

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2017 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja merupakan iktisar hasil (out come) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2017 dari hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan predikat sangat baik dan baik, dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase tenaga kerja yang berkompeten, capaian kinerja 102,77%, predikat "Sangat Baik"

Indikator 2 : Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), capaian kinerja 100%, predikat "Sangat Baik"

Indikator 3 : Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%, predikat "Sangat Baik"

Indikator 4 : Persentase serapan tenaga kerja sektor informal, capaian kinerja 174,857%,predikat "Sangat Baik"

Indikator 5 : Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial, capaian kinerja 129,17%,predikat "Sangat Baik"

Indikator 6 : Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program

BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja 106,08%,predikat “Sangat Baik”

Indikator 7 : Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian kinerja 99,28%,predikat “Baik”

Indikator 8 : Persentase perusahaan yang melakukan SMK3, capaian kinerja 100,09%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 9 : Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 10 : Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha

ekonomi dan sosial budaya, capaian kinerja 100%,predikat “Sangat Baik”

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tiap sasaran dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Capaian				Kategori
	Sat	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten					
1. - Persentase tenaga kerja yang berkompeten	%	44,31	45,54	102,77	Sangat baik
2. - Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	%	49,37	49,37	100	Sangat baik
Meningkatnya serapan Tenaga kerja					
1. - Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	%	21,46	28,45	132,57	Sangat baik
2. - Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	%	3,54	6,19	174,85	Sangat baik
Meningkatnya hubungan Industrial, yang harmonis antara pekerja dan pengusaha					
1. - Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial	%	4,73	6,11	129,17	Sangat baik
2. - Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	%	7,07	7,50	106,08	Sangat baik
Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh					
1. - Persentase kepatuhan	%	48,92	48,57	99,28	Baik

perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan					
2. - Persentase perusahaan melakukan SMK3	%	10,64	10,65	100,09	Sangat baik
Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi					
1. - Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya	%	40,00	40,00	100	Sangat baik

Mengacu pada 5 (lima) sasaran yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) indikator kinerja semuanya telah berhasil mencapai predikat Sangat Baik yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 17.519.229.417 dengan realisasi Rp.16.506.326.633 atau realisasi fisik 100% dan keuangan 94,22%, anggaran APBN sebesar Rp.7.299.447.000 dengan realisasi Rp.7.026.110.633 atau realisasi fisik 99,23 % dan keuangan 96,26 %.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat tersusun.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yaitu (1) meningkatkan tenaga kerja yang kompeten, (2) meningkatnya serapan tenaga kerja (3) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, (4) meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh, (5) terpenuhinya sarana/prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi. Sasaran dan indikator tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), KUA PPAS, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPPA.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Semoga LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700114 198902 1 001

BAB. I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih Berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar.

Pembangunan yang maju dan mandiri menuntut kemampuan ekonomi yang tumbuh cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan.

Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja lain dinegara-negara Asean. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan berbasis kompetensi (Competency base education and training) yang dilengkapi dengan sertifikasi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh samanya angka reproduksi neto (NRR) dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saing sesuai dengan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sertifikasi profesi secara menyeluruh.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tertuang bahwa pada kurun waktu 2016 – 2021 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui Misi ke 4 yakni “ Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.” Sementara itu, kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja informal. Selain itu diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak. Sedangkan pembangunan Bidang Ketramigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada tahun 2017 menunjukkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Sumatera Barat. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2017. Sebagai informasi fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2017, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 2.344.970 jiwa, dengan penduduk berpendidikan maksimum SD ke bawah adalah 880.910 ribu jiwa (37,57 %); SMP 423.380 jiwa (18,05 %), SMK 227.170 jiwa (9,69 %), SMA 474.210 jiwa (20,22 %); Diploma 86.600 jiwa (3,69 %); dan Universitas 252.700 jiwa (10,78 %).

Berdasarkan data tersebut, penduduk usia kerja yang bekerja, persentase terbesar didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP yaitu sebesar 55,62 % hal ini terjadi karena semakin meningkatnya penduduk berpendidikan SD dan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi terpaksa masuk kedalam pasar kerja, sehingga dalam menghadapi era global ini tantangan terbesar dari dalam Sumatera Barat yaitu bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar memiliki daya saing di rumah sendiri menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja asing serta berkemampuan untuk memasuki pasar kerja global. Disamping itu, kurangnya keterampilan kewirausahaan (entrepreneur) dari angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja baru. Tidak mudah menggeser struktur tingkat pendidikan tenaga kerja, butuh waktu cukup lama dan komitmen kita semua untuk mewujudkannya.

Di bidang Pelatihan bagaimana mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta yang ada untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan langsung dapat diserap oleh pasar kerja. Di bidang penempatan tenaga kerja, dituntut kreatifitas sehingga mampu diciptakan kesempatan kerja baru, efektifnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan mudahnya pengisian pasar kerja yang tersedia. Di bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, yang menjadi tantangan adalah memantapkan aturan main, mengelola akses dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan masalah alih daya (outsourcing), penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Di bidang Ketrasmigrasian, tantangan juga terus semakin berat. Masalah pertanahan dengan segala aspeknya baik untuk perencanaan dan penempatan transmigrasi baru maupun yang masih dalam pembinaan. Begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi, kualitas calon transmigran serta belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

B. TUGAS DAN WEWENANG.

Keberadaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Tugas

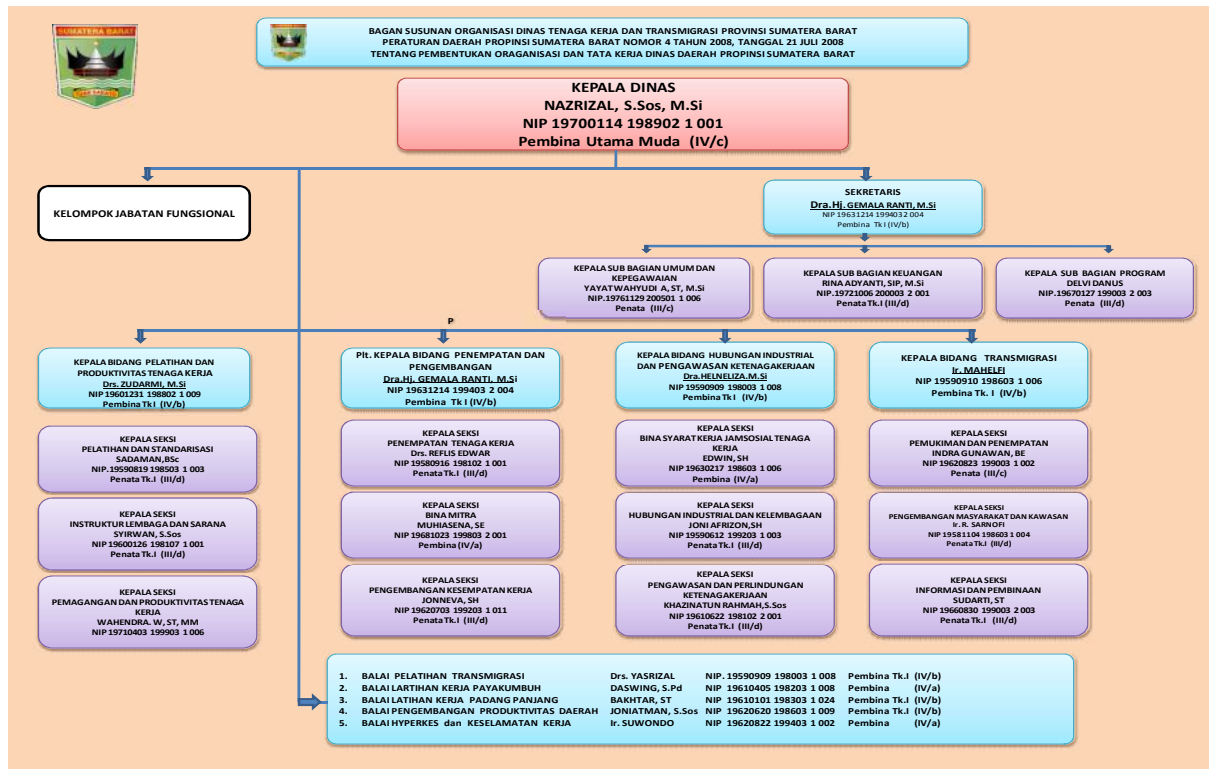
Disnakertrans mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



Sedangkan organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan dan Perumusan Rencana Stratejik.
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas keseimbangan.

f. Pengkoordinasian penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(2) Sub Bagian Keuangan

(3) Sub Bagian Program

3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja. Dengan fungsi :

- a. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
- b. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja berdasarkan skala prioritas.
- c. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan
- f. Pelaksanaan pertanggung jawaban kegiatan dan penyusunan laporan.

4. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Pelatihan dan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Instruktur Lembaga dan Sarana
- (3) Seksi Pemagangan dan Produktifitas Tenaga Kerja

5. Bidang Penempatan dan Pengembangan

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penempatan dan pengembangan tenagakerja.

Adapun fungsinya :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
- c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang penempatan dan Pengembangan berdasarkan skala prioritas.
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- f. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Bidang Penempatan dan Pengembangan terdiri dari :

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- (2) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja
- (3) Seksi Bina Mitra

6. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Adapun fungsinya :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- b. Penganalisaan Program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
- c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan skala prioritas.
- d. Pengaturan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- f. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- (1) Seksi Bina Syarat Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan
- (3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

7. Bidang Transmigrasi

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Transmigrasi. Dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
- c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Transmigrasi berdasarkan skala prioritas.
- d. Pengaturan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- (1) Seksi Pemukiman dan Penempatan
- (2) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- (3) Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Ketransmigrasian

8. UPTD Balai Latihan Transmigrasi, membawahi :

-) Sub Bagian Tata Usaha
-) Seksi Pelatihan dan Bimbingan Konsultasi
-) Seksi Analisis dan Pengukuran Produktivitas

9. UPTD BPPD, membawahi :
 2. Sub Bagian Tata Usaha
10. UPTD Hyperkes, membawahi :
 -) Sub Bagian Tata Usaha
 -) Seksi Akreditasi dan Standarisasi
 -) Seksi Informasi dan Asosiasi Profesi
11. UPTD BLK Payakumbuh, membawahi :
 -) Sub Bagian Tata Usaha
12. UPTD BLK Padang Panjang, membawahi :
 -) Sub Bagian Tata Usaha

C. ASPEK SUMBERDAYA

Jumlah personil dan tata laksana Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat

Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di dukung oleh 235 orang pegawai yang terdiri dari 233 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang pegawai harian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan (Desember 2017)

No	Jabatan	Jumlah (orang)	%
1.	Struktural :	25	10,63
	Eselon II	1	0,42
	Eselon III	7	2,98
	Eselon IV	17	7,23
2.	Fungsional :	76	32,34
	- Perantara Hubungan Industrial	3	1,28
	- Pengantar Kerja	11	4,69
	- Pengawas Tenaga Kerja	18	7,66
	- Penggerak Swadaya Masyarakat	6	2,55
	- Instruktur	30	12,77
	- Penguji K3	5	2,13
	- Teknisi Litkayasa	2	0,85
	- Pranata Komputer	1	0,42
3.	Fungsional Umum	132	56,17
4.	Pegawai Harian	2	0,85
	Jumlah	235	100,00

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural sebesar 10,63 %. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas

yang ada (pejabat struktural bidang Ketenagakerjaan sebanyak 25 orang, di bidang Ketransmigrasian sebanyak 4 orang. Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut.

Selain itu, terdapat 2. (dua) orang pejabat eselon III dan IV yang belum mengikuti Diklat pim Tk. III dan Tk. IV. Di samping jenis jabatan struktural, terdapat 7 jenis jabatan fungsional di lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan jumlah total 76 orang atau 32,64% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan calon fungsional di bidang Ketenagakerjaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2015 Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 15 orang (lima belas) CPNS dengan formasi 1 orang (satu) calon Pengawas Ketenagakerjaan dan 1 orang (satu) calon Mediator, 2 orang (dua) calon Pengantar kerja, 1 orang (satu) PSM, Instruktur. Semua CPNS sudah ditempatkan dan difungsikan sesuai dengan jabatan pada SK. Untuk menduduki jabatan fungsional perlu menempuh diklat dasar fungsional, maka Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat sudah mengusulkan diklat dasar fungsional kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Secara mandiri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural sebesar 14,89%. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada (pejabat struktural bidang ketenagakerjaan sebanyak 31 orang, di bidang ketransmigrasian sebanyak 4 orang. Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut. Selain itu, terdapat 2 (dua) orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti Diklat Pim IV.

Di samping jenis jabatan struktural, terdapat 6 jenis jabatan fungsional di lingkup bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan jumlah total 53 orang atau 22,55% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan sebanyak 15 orang (lima belas) PNS dengan formasi 1 orang (satu) Pengawas Ketenagakerjaan dan 1 orang (satu) Mediator, 2 orang (dua) Pengantar kerja, 1 orang (satu) PSM, Instruktur. Semua PNS sudah ditempatkan dan difungsikan sesuai dengan jabatan pada SK. Untuk menduduki jabatan fungsional perlu menempuh diklat dasar fungsional, maka Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat sudah mengusulkan diklat dasar fungsional kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Secara mandiri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional

Tabel. 2.2.2
Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember 2017)

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Pasca Sarjana (S2)	12	5.10
2	Sarjana (S1)	87	37,02
3	Sarjana Muda (D3)	22	9.35
4	Diploma 1 (D1)	6	2.55
5	SLTA	99	42.12
6	SLTP	3	1.27
7	SD	6	2.55
	Jumlah	235	100

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan SLTA yaitu sebesar 42.12 % dari seluruh pegawai. Dengan demikian apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini dianggap tidak memadai diperbandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini beberapa pegawai yang berasal dari Diploma maupun SMA tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Demikian juga halnya dengan pegawai berpendidikan S1, beberapa diantaranya tengah melanjutkan pendidikan S2, baik atas biaya sendiri maupun beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

Tabel 2.2.3
Jumlah berdasarkan Golongan (Desember 2017)

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	37	15.74
2	III	159	67.66
3	II	33	14.04
4	I	2	0.85
	Jumlah	235	100

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 67.81 % dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 15.88 % dari seluruh pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Desember 2017)

No	Unit Organisasi	Jumlah		%
		L	P	
1	Kepala	1		0.41
2	Sekretariat	22	25	20.16
3	Bidang Lattas	9	4	5.57
4	Bidang Penta	11	12	9.86
5	Bidang HI WAS	14	9	9.86
6	Bidang Transmigrasi	13	12	10.70
7	UPTD BPPD	11	6	7.26
8	UPTD Hiperkes	6	12	7.70
9	UPTD Balatrans	12	9	9.00
10	UPTD BLK Padang Panjang	17	5	9.86
11	UPTD BLK Payakumbuh	19	4	9.86
	' Jumlah	135	98	100

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 233 pegawai di lingkup Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 79,44 % berada di Unit Pelaksana dan (UPTD). Hal ini dikarenakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) UPTD yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan analisa terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih rinci muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Bab. I. Pendahuluan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang sedang dihadapi, struktur organisasi, aspek sumber daya dan sistematika penyajian.

Bab. II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang strategi dan penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Bab. III. Akuntabilitas Kinerja.

Menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan realisasi anggaran Tahun 2016.

Bab. IV. Penutup.

Menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan kondisi yang diharapkan tahun mendatang.

BAB.II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu Instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penanganan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) 2016-2021.

Tujuan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam RPJMD 2016-2021 mengacu pada 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu “Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal”.

Dalam Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, terdapat 5 Misi Pembangunan yang ditetapkan. Adapun Misi dimaksud tersebut adalah :

1. Meningkatnya tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

6. Dari ke lima Misi tersebut terdapat yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
- b. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, yang merupakan pelaksanaan pembangunan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bagian integral dari pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi :“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”					
Misi 4 : “ Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya pembangunan daerah”					
Prioritas 8 : “Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal”.					
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengatasi pengangguran 2. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.	1. Peningkatan kualitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja 3. Peningkatan kewirausahaan. 4. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja 5. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku wisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja 2. % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan pemagangan 3. % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan produktivitas 4. % Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	
	1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu. 2. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja	1. Peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha	1. % serapan tenaga kerja sektor formal. 2. % serapan tenaga kerja sektor in formal. 3. % pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga 4. Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia 5. % Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat 6. % tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara pengguna TKA.	.

LAKIP DISNAKERTRANS 2017

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.	1. Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran pengawas Ketenagakerjaan, dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	2. % penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial. 3. % peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.	
	2. Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/ buruh 3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2. Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB). Jumlah perusahaan yang diperiksa	1. Perlindungan tenaga kerja dan sitem pengawasan tenaga kerja. 2. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium. Peningkatan pendapatan daerah	1. % kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. 2. % perusahaan melakukan SMK3 3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium 1. Jumlah retribusi perusahaan yang diperiksa	
Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman dan kawasan transmigrasi.	Terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi .	1. Peningkatan dan partisipasi pembinaan transmigrasi	Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal.	1. % kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi 2. % kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya 3. Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi..	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1 Meningkatkan tenaga kerja yang kompeten	-Persentase tenaga kerja yang berkompeten	%	44,31
	-Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	%	49,37
2 Meningkatnya serapan Tenaga kerja	-Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	%	21,46
	-Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal	%	3,54
3 Meningkatnya hubungan Industrial, yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	-Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial	%	4,73
	-Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	%	7,07
4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh	-Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan Per Undang-Undang Ketenagakerjaan	%	48,92
	-Persentase perusahaan melakukan SMK3	%	10,64
5. Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi	-persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan Usaha Ekonomi. dan Sosial Budaya	%	40,00

Penetapan target indikator dari masing-masing sasaran dapat dirinci sbb :
Sasaran I Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten terdiri dari 2 indikator :

1. Indikator persentase tenaga kerja yang berkompeten didapatkan melalui 3 (tiga) komponen sub indikator yaitu :

a) Melalui komponen pelatihan kerja

Uraian kegiatan	Target
➤ Jumlah pelatihan BLKI Padang	864 orang
➤ Jumlah pelatihan BLK Prov dan Kab/Kota APBN	1.296 orang
➤ Jumlah pelatihan BLK Provinsi dll (dana nagari)	960 orang
➤ Jumlah pelatihan BLK Kab/Kota	432 orang
➤ Jumlah pelatihan APBD Kab/Kota non BLK	480 orang
➤ Jumlah pelatihan LPKS	7.968 orang
Jumlah	12.000 orang

b) Melalui komponen pelatihan pemagangan

Uraian kegiatan	Target
➤ Jumlah magang Dalam Negeri (APBN)	300 orang
➤ Jumlah magang Dalam Negeri (APBD)	30 orang
➤ Jumlah magang mandiri	30 orang
➤ Jumlah magang IM Japan	35 orang
➤ Jumlah magang sending	105 orang
Jumlah	500 orang

c) Melalui komponen pelatihan produktivitas

Uraian kegiatan	Target
➤ PKM	100 orang
➤ Pelatihan wira usaha baru	50 orang
➤ Peningkatan produktivitas	150 orang
Jumlah	300 orang

2. Indikator : Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi

Uraian	Target
➤ Jumlah LPK terakreditasi	158 LPK
Jumlah	158 LPK

2. Sasaran : Meningkatnya serapan tenaga kerja

Indikator : Persentase serapan tenaga kerja sektor formal

Uraian	Target
➤ Penempatan tenaga kerja AKL	4.700 orang
➤ Penempatan tenaga kerja AKAD	200 orang
➤ Penempatan tenaga kerja AKAN	1.300 orang
Jumlah	6.200 orang

Indikator : Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal

Uraian	Target
➤ Padat karya	604 orang
➤ Tenaga kerja mandiri	380 orang
➤ Teknologi Tepat Guna (TTG)	40 orang
- Jumlah	1.024 orang

3. Sasaran : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Indikator : Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

Uraian	Target
➤ .Jumlah kasus ketenagakerjaan diselesaikan.	180 kasus

Indikator : Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Uraian	Target
➤ Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta proram BPJS Ketenagakerjaan.	154.465 orang

4. Sasaran : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh

Indikator : Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (WLK, UMP)

Uraian	Target
➤ Jumlah perusahaan yang mematuhi peraturan Per Undang-Undang	1.807 perusahaan

Indikator : Persentase perusahaan melakukan SMK3

Uraian	Target
➤ Jumlah perusahaan yang melaksanakan SMK3	28 SMK3

- Sasaran : Peningkatan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan Transmigrasi.

Indikator : Persentase Kawasan Transmigrasi Yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

Uraian	Realisasi
- Persentase Kawasan Transmigrasi Yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya.	75 %
- Persentase Kawasan Transmigrasi Yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya.	75 %

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun penjabaran program dan kegiatan dari kebijakan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tetap memperhatikan Visi dan Misi organisasi, dokumen-dokumen perencanaan daerah.

Program dan kegiatan APBD 2017

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %
			Keuangan (Rp.)	%	
I.	POKOK	5.105.375.459	4.775.508.521	93,54	100
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.568.027.380	2.396.756.983	93,33	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	98.715.380	82.589.700	83,66	100
2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	510.079.500	463.017.108	90,77	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor, pengaman dan sopir kantor	949.359.000	899.314.657	94,73	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	102.717.750	102.034.550	99,33	100

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %
			Keuangan (Rp.)	%	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.930.750	62.975.600	94,09	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	23.381.750	23.362.575	99,92	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.928.000	24.035.000	89,26	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	76.271.250	72.233.000	94,71	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	563.240.375	534.192.711	94,84	100
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	131.403.625	115.352.082	87,78	100
11	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	19.000.000	17.650.000	92,89	100
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.277.905.900	1.198.792.736	93,81	100
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	343.141.000	333.380.000	97,16	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.898.000	220.643.500	96,82	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	232.257.000	192.911.186	83,06	100
4	Pengadaan meubeleur	29.199.500	27.680.000	94,80	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	111.375.000	93.557.050	84,00	100
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	334.035.400	330.621.000	98,98	100
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	190.400.000	186.300.000	97,85	100
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	190.400.000	186.300.000	97,85	100
D.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48.625.000	39.560.000	81,36	100
1.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	48.625.000	39.560.000	81,36	100
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	644.512.929	617.319.175	97,78	100
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	249.995.000	247.926.625	99,17	100
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	394.517.929	369.392.550	93,63	100
F.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET	375.904.250	336.779.627	89,59	100
1.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	155.665.000	152.908.348	98,23	100
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	71.000.000	67.740.179	95,41	100
3.	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	149.239.250	116.131.100	77,82	100

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %
			Keuangan (Rp.)	%	
II.	URUSAN	12.413.853.958	11.730.818.112	94,50	100
A.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.893.173.721	8.331.966.757	93,69	100
1.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Payakumbuh	3.550.880.993	3.346.683.448	94,25	100
2.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Padang Panjang	3.641.290.873	3.357.247.210	92,20	100
3.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)	238.774.000	234.795.050	98,33	100
4.	Seleksi calon peserta magang ke Jepang	325.000.000	308.976.770	95,07	100
5.	Akreditasi program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	124.564.000	115.116.450	92,42	100
6.	Pelatihan pemagangan dalam negeri	150.000.000	144.212.450	96,14	100
7.	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri	50.000.000	49.306.800	98,61	100
8.	Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktif	322.845.000	310.534.150	96,19	100
9.	Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja	65.065.000	60.980.800	93,72	100
10.	Uji sertifikasi kompetensi metodologi pelatihan	357.755.855	341.883.429	95,56	100
11.	Pelatihan soft skill instruktur	66.998.000	62.230.200	92,88	100
B.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DISVERSIFIKASI USAHA	1.227.472.137	1.195.285.143	97,38	100
1.	Pengumpul dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK)	40.000.000	38.177.050	95,44	100
2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	50.000.000	44.258.100	88,52	100
3.	Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri / Luar Negeri	80.000.000	79.270.000	99,09	100
4.	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pogram Gramen Bank	17.210.600	17.210.600	100	100
5.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja	85.000.000	84.444.300	99,35	100
6.	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	200.000.000	198.066.000	99,03	100
7.	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)	237.937.537	234.441.550	98,53	100
8.	Sosialisasi peraturan di perusahaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan	70.000.000	68.194.650	97,42	100
9.	Identifikasi lokasi wilayah padat karya	44.324.000	42.937.400	96,87	100
10.	Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK	75.000.000	74.377.700	99,17	100
11.	Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja	48.000.000	40.198.000	83,75	100
12.	Pembinaan calon TKI Pra Pemberangkatan	100.000.000	97.995.958	98,00	100
13.	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS)	110.000.000	105.805.335	96,19	100
14.	Monitoring dan Orientasi Pra-Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD	70.000.000	69.908.500	99,87	100

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %
			Keuangan (Rp.)	%	
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	434.556.500	411.471.250	94,69	100
1.	Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	96.936.500	95.362.000	98,38	100
2.	Pembinaan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan	96.973.000	89.428.450	92,22	100
3.	Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	82.691.000	82.619.550	99,91	100
4.	Pembinaan dan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi	100.400.000	93.676.000	93,30	100
5.	Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	57.556.000	50.385.250	87,54	100
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA	1.102.747.400	1.048.826.433	95,11	100
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ke Perusahaan Kabupaten/Kota	187.367.150	175.956.700	93,91	100
2.	Pembinaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Perusahaan	251.037.500	242.365.350	96,55	100
3.	Identifikasi Kecelakaan Kerja di Perusahaan Kab/Kota	137.336.500	132.251.250	96,50	100
4.	Pra-Akreditasi laboratorium	148.292.150	135.896.301	91,64	100
5.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	149.130.100	143.858.659	96,47	100
6.	Pengujian Lingkungan Kerja	149.784.000	144.061.950	96,14	100
7.	In House Training Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	79.800.000	74.436.223	93,28	100
E.	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	604.302.200	591.666,529	97,91	100
1.	Pelatihan Keterampilan warga Transmigrasi	500.000.000	493.024.750	98,60	100
2.	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	104.302.200	98.641.779	94,57	100
F.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	151.602.000	151.602.000	100,00	100
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	151.602.000	151.602.000	100,00	100
	Jumlah Belanja Langsung	17.332.182.900	15.397.015.922	88,83	99,01

a. Program dan kegiatan APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

NO. KODE	PROGRAM / KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)
1	2	4	5
I	SATUAN KERJA (026.04.089079) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (04)		
026.13.06	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	2.499.295.000	2.464.969.614
2218	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	101.610.000	101.308.826
4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	97.980.000	82.442.000
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	1.908.400.000	1.906.376.000
4060	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	391.305.000	374.842.788
II	SATUAN KERJA (026.05.089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT (05)		
026.05.08	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	788.970.000	768.629.950
2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan	197.470.000	193.144.750
2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	35.000.000	28.373.000
2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	183.476.000	182.408.700
2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	170.024.000	166.237.000
III	SATUAN KERJA (026.06.089023) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT (06)		
067.07.10	PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	1.366.200.000	1.340.974.574
5505	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1.093.857.000	1.083.960.674
5507	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	222.131.000	207.951.900
5508	Penyediaan Tanah Transmigrasi	20.764.000	19.690.500
5510	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	29.448.000	29.371.500
IV	SATUAN KERJA (067.08.350145) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
067.08.11	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	858.844.000	817.162.500
5511	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	192.764.000	169.238.500
5512	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	42.051.000	38.174.000
5513	Pengembangan usaha transmigrasi	118.300.000	117.972.000
5514	Pengembangan sosial budaya transmigrasi	445.229.000	434.202.000
5515	Pelayanan pertanahan transmigrasi	60.500.000	57.576.000

V	SATUAN KERJA (026.08.089025) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (08)		
026.08.09	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.786.138.000	1.634.373.995
2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	438.998.000	377.508.934
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	38.620.000	35.200.000
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	712.538.000	652.644.218
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	356.530.000	342.396.543
2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	239.452.000	226.624.300
	JUMLAH RUPIAH MURNI	7.299.447.000	7.026.110.633

BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan kinerja Disnakertrans tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skor	Capaian	Keterangan
4	> 100 %	sangat baik
3	75 % - 100 %	baik
2	55 % - 74 %	cukup
1	< 55 %	kurang

Pengukuran terget kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat beserta target dan capaian realisainya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 dan 2017.

Indikator Kinerja	2016			2017		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja %	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja %
Persentase tenaga kerja yang berkompeten	66,15	52,69	79,65	44,31	45,54	102,77
Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi	11,36	9,47	83,36	-	-	-
Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	-	-	-	49,37	49,37	100
Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	17,43	19,13	109,75	21,46	28,45	132,57
Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal	87,20	105	120,41	3,54	6,19	174,85
Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial	4,87	4,49	92,20	-	-	-
Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	4,73	6,11	129,17
Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	6,86	6,79	98,98	-	-	-
Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	-	-	-	7,07	7,50	106,08
Persentase kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	48,82	48,77	99,90	-	-	-
Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan	-	-	-	48,92	48,57	99,28
Persentase perusahaan melakukan SMK3	10,64	8,74	82,14	10,64	10,65	100,09
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi	75	75	100	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya	75	75	100	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya	-	-	-	40,00	40,00	100

Pencapaian target dan realisasi :

I. Sasaran strategis I : Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten

1) Indikator kinerja persentase tenaga kerja yang berkompeten terdiri dari 3 sub indikator

a) Persentase tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan kerja

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja berkompeten melalui pelatihan kerja}}{\text{Pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya}}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk perhitungan target} &= 12.000 / 28.889 \times 100 = 41,54 \% \\ \text{Untuk realisasi} &= 12.211 / 28.889 \times 100 = 42,27 \% \\ \text{Capaian realisasi} &= 42,27 / 41,54 \times 100 = 101,75 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.3
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kerja

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah pelatihan BLKI Padang	1.120	orang
2.	Jumlah pelatihan BLK Prov dan Kab/Kota APBN	1.344	orang
3.	Jumlah pelatihan BLK Provinsi dll (dana nagari)	1.424	orang
4.	Jumlah pelatihan BLK Kab/Kota	698	orang
5.	Jumlah pelatihan APBD Kab/Kota non BLK	650	orang
6.	Jumlah pelatihan LPKS	6.975	orang
	Jumlah	12.211	orang

b) Persentase Tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan pemagangan

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja berkompeten melalui pemagangan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk perhitungan target} &= 500 / 28.889 \times 100 = 1,73 \% \\ \text{Untuk realisasi} &= 510 / 28.889 \times 100 = 1,77 \% \\ \text{Capaian realisasi} &= 1,77 / 1,73 \times 100 = 102,31 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.4
Jumlah Pelaksanaan Pemagangan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Magang dalam negeri (APBN)	300	orang
2.	Magang dalam negeri (APBD)	32	orang
3.	Magang mandiri	25	orang
4.	Magang IM Japan	54	orang
5.	Magang sending	99	orang
	Jumlah	510	orang

c) Persentase Tenaga kerja yang kompeten melalui produktivitas

Formulasi = $\frac{\text{Jumlah pencari kerja berkompeten melalui produktivitasnya}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya}} \times 100 \%$

Untuk perhitungan target = $300 / 28.889 \times 100 = 1,04 \%$
 Untuk realisasi = $435 / 28.889 \times 100 = 1,50 \%$
 Capaian realisasi = $1,50 / 1,04 \times 100 = 144,23 \%$

Tabel 3.5
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Produktivitas

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri	100	orang
2.	Pelatihan Wira Usaha Baru	60	orang
3.	Pelatihan peningkatan produktivitas	275	orang
	Jumlah	435	orang

Realisasi sasaran persentase tenaga kerja yang berkompeten yang terdiri dari 3 indikator dengan target sebesar 44,31 % (41,54 % + 1,73 % + 1,04 %) dengan realisasi 45,54 % (42,27 % + 1,77 % + 1,50 %)

2) Pencapaian target dan realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi

Formulasi = $\frac{\text{Jumlah LPK terakreditasi}}{\text{Jumlah LPK di Sumbar}} \times 100 \%$

Untuk perhitungan target = $158 / 320 \times 100 = 49,37 \%$
 Untuk realisasi = $158 / 320 \times 100 = 49,37 \%$

$$\text{Capaian realisasi} = 49,37 / 49,37 \times 100 = 100 \%$$

Realisasi sasaran persentase tenaga kerja yang berkompeten, dengan demikian capaian kinerja tahun 2017 sebesar 101,75 % dalam kategori “ Sangat baik “.

Besarnya angka kelulusan Pelatihan Kerja mewujudkan makin banyaknya tenaga kerja /calon tenaga kerja yang memiliki bekal keterampilan (skill). Jumlah Tenaga kerja yang dilatih meningkat karena adanya peluang untuk nagari-nagari meningkatkan kualitas SDMnya melalui kerjasama pelatihan dengan BLK yang didanai oleh Nagari di Sumatera Barat. Untuk masa akan datang diupayakan paket pelatihan yang dilaksanakan akan di Uji Kompetensi, sehingga tenaga kerja yang lulus pelatihan memiliki standar kompetensi yang berdaya saing dalam mengisi peluang di pasar kerja.

Upaya pengembangan calon skill pencari kerja untuk mengikuti pelatihan melalui 1 UPTP Kementerian Ketenagakerjaan, 2 UPTD Provinsi dan 9 UPTD Kab/ Kota di Sumatera Barat dengan berbagai kejuruan, diantaranya : Mobileir, Las Listrik, Menjahit, Sepeda Motor, Processing, Teknik Pendingin, Elektronika, Teknisi HP/Teknisi Komputer, Tata Boga.

Kegiatan pemagangan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam menganggarkan kegiatan yang mendukung pemagangan luar negeri dan meningkatnya kesadaran perusahaan dalam mengikuti pemagangan dalam negeri dan mandiri.

Produktivitas merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong daya saing, vitalitas dan kualitas tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan hal ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan dunia usaha yang akan menyerap tenaga kerja ataupun penciptaan peluang dan kesempatan kerja baru. Adanya kegiatan Balai Besar Produktivitas (Pusat) menjadi kondisi positif untuk penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang saat ini tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, karena jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang besar.

Oleh karena itu maka pencari kerja, calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja yang telah bekerja selain diberi keterampilan dan kompetensi yang memadai perlu dibekali dengan keterampilan softskill berupa pengetahuan dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan, manajemen usaha UKM seta produktivitas agar menjadi calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) Prov. Sumatera Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja yang bertugas dalam pembinaan manajemen produktivitas, mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam melaksanakan tugas pembinaan pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, pelaku usaha (UMKM dan UKM) serta masyarakat.

Indikator kinerja Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi tahun 2017 sebesar 49,37 %, dengan realisasi 49,37 %, hal ini capaian kinerja tahun 2017 hanya sebesar 100 %, kategori “ Sangat baik “.

- Untuk pencapaian sasaran Strategis I, Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase tenaga kerja yang berkompeten, persentase lembaga pelatihan kerja (LPK) terakreditasi ada beberapa penilaian Indikator dilakukan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk memudahkan proses akreditasi lembaga pelatihan kerja telah didukung dengan aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat Lembaga dan Sarana kemnaker RI, dalam hal ini dibandingkan dengan Provinsi lainnya terlihat pada

Tabel 3.6
Perbandingan tingkat lulusan pelatihan dengan Provinsi terdekat

No	Provinsi	Indikator	Nilai tahun 2016
1.	Bengkulu	Tingkat lulusan pelatihan	7,07
2.	Sumatera Barat	Tingkat lulusan pelatihan	6,42
3.	Jambi	Tingkat lulusan pelatihan	3,74

Tabel 3.7 :
Kondisi instruktur Balai Latihan Kerja di Sumatra Barat Saat ini

No	Nama BLK	Jurusan Tersedia	Instruktur		
			Tersedia	Seharusnya	Kurang
1	BLK Padang Panjang	8	15	25	10
2	BLK Payakumbuh	8	16	24	8
3	BLK Pariaman	8	19	28	10
4	BLK Lubuk Sikaping	5	6	14	8
5	BLK Sungai Dareh	8	12	18	6
6	BLK Solok	8	17	23	6
7	BLK Painan	8	9	17	8

8	BLK Sijunjung	4	0	8	8
JUMLAH		57	94	157	63

Tercapainya kinerja pelatihan pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal :

- Pelatihan Kerja disamping diseleggarakan oleh BLK pemerintah juga sangat didukung oleh LPK Swasata (LPKS), namun belum semua LPKS yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pelatihan dengan baik, karena belum terakreditasi, sampai akhir tahun 2017 dari 320 LPKS yang ada baru 134 LPKS.
- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan dana pelatihan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
- Mengikutsertakan instruktur pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM instruktur dan telah mengusulkan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon instruktur.
- Meningkatkan akreditasi LPKS mencetak tenaga kerja yang kompeten.

II. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

1) Indikator persentase serapan tenaga kerja sektor formal

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$$

$$\text{Untuk perhitungan target} = 6.200 / 28.889 \times 100 = 21,46 \%$$

$$\text{Untuk realisasi} = 8.812 / 28.889 \times 100 = 30,53 \%$$

$$\text{Capaian realisasi} = 30,53 / 21,46 \times 100 = 142,26 \%$$

Tabel 3.8 :
Rincian realisasi

No	Uraian kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Antar Kerja Lokal (AKL)	6.479	orang
2.	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	1.430	orang
3.	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	903	orang
	Jumlah	8.812	orang

Target indikator kinerja Persentase serapan tenaga kerja sektor formal dii atas sebesar 21,46 % dengan realisasi 30,53 % dan capaian realisasi 142,26 %. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2017 melebihi 100 % dalam kategori “Sangat Baik “.

Peningkatan serapan tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan kegiatan Pelayanan Antar Kerja. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja merupakan mekanisme pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan kegiatan Antar Kerja kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja, baik untuk sementara waktu maupun tetap dan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme ini meliputi pelayanan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja dan tindak lanjut penempatan. Sedangkan dan penempatan tenaga kerja meliputi penempatan tenaga kerja formal dan in formal:

Penempatan tenaga kerja formal terdiri dari :

- a) Antar Kerja Lokal (AKL) yaitu proses penempatan Tenaga Kerja antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- b) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yaitu kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja antar Provinsi didalam wilayah Republik Indonesia
- c) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yaitu proses penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Perbandingan indikator persentase serapan tenaga kerja sektor formal dengan Provinsi lain (Indek Pembangunan Ketenagakerjaan IPK)

Tabel 3.9
Perbandingan Kesempatan Kerja Sektor Formal

No	Provinsi	Indikator Utama	Nilai tahun 2016
1.	Kepri	Pemerataan Kesempatan Kerja	71,90
2.	Riau	Pemerataan Kesempatan Kerja	51,36
3.	Sumatera Barat	Pemerataan Kesempatan Kerja	39,59

a) Indikator persentase serapan tenaga kerja sektor in formal

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Serapan Tenaga Kerja Informal}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk perhitungan target} &= 1.036 / 29.473 \times 100 = 3,5 \% \\ \text{Untuk realisasi} &= 1.788 / 29.473 \times 100 = 6,07 \% \\ \text{Capaian realisasi} &= 6,07 / 3,5 \times 100 = 173,42 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.10
Rincian Realisasi

No	Uraian kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Padat karya	968	orang
2.	Tenaga kerja mandiri	780	orang
3.	Teknologi Tepat Guna (TTG)	40	orang
4.	Grameen Bank	-	orang
5.	Kewirausahaan BPPD	566	orang
	Jumlah	2.354	orang

Salah satu indikator yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal melalui sektor ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang dibina di sektor informal usaha mandiri baik melalui wira usaha maupun pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, Pola grameen Bank. Artinya tenaga kerja yang dibina telah memiliki pendapatan tetap dari usahanya tersebut, usahanya tidak berhenti beroperasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang cukup tinggi dan merekrut tenaga kerja baru di daerah sekitarnya. Namun awal tahun 2017 kegiatan Grameen Bank dihentikan karena permasalahan pengelolaan dana Grameen Bank.

Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor In Formal dengan target kinerja 3,5 % realisasi 6,07 % dan capaian kinerja 173,42 %. Ini termasuk kategori "Sangat Baik". Capaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkat sesuai target yang ditetapkan, sehingga semakin banyak penganggur/pencari kerja yang tertampung di sektor informal.

Perbandingan indikator persentase serapan tenaga kerja sektor in formal dengan Provinsi lain (Indek Pembangunan Ketenagakerjaan IPK)

Tabel 3.12 :
Perbandingan Kesempatan Kerja Sektor In Formal dengan Provinsi terdekat

No	Provinsi	Indikator Utama	Nilai tahun 2016
1.	Bengkulu	Tingkat Kesempatan Kerja	95,09
2.	Sumatera Barat	Tingkat Kesempatan Kerja	93,11
3.	Jambi	Tingkat Kesempatan Kerja	95,11

Sasaran meningkatnya perluasan lapangan kerja sektor Informal dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan kesempatan kerja Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna, Usaha Mandiri dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dan lain-lain. Pemecahan isu pengangguran juga dilakukan melalui upaya pembinaan dan fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja. Untuk memperluas kesempatan kerja didalam negeri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung penempatan tenaga kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi SDA, SDM dan Teknologi Tepat Guna. penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan system padat karya infrastruktur maupun padat karya produktif, penerapan teknologi tepat guna, program kewirausahaan melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri professional, pendampingan atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kerja di sektor informal.

Keberhasilan peningkatan kinerja sektor Informal di Provinsi Sumatera Barat adalah besarnya animo dan jiwa enterpreneur masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk membuka usaha mandiri, menciptakan kesempatan kerja baru melalui kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan, dengan memilih dan menetapkan komoditi usaha yang lebih cepat menghasilkan atau jenis komoditi usaha yang lebih cepat menghasilkan atau jenis komoditi usaha mikro yang siklusnya pendek, perputaran modal cepat atau lebih prespektif terutama sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu adanya komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat memajukan sektor informal melalui usaha- usaha ekonomi produktif, untuk pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan pencapaian indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Informal adalah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan-kegiatan yang diberikan Pusat, yang tidak masuk dalam perencanaan semula yang bersifat luncuran, menyebabkan peningkatan serapan tenaga kerja di sektor informal
- Telah dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif dan Infrastruktur di Kab./Kota dengan penyerapan tenaga kerja 968 orang

- Telah dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri di Kab./Kota dengan penyerapan tenaga kerja 780 orang
- Telah dilakukan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Teknologi Tepat Guna dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 orang.
- Tenaga kerja sector informal ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat disekitarnya.
- Untuk peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja baik formal maupun informal telah dilaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada calon pencari kerja meliputi siswa SMK pada Kab./Kota yang dilaksanakan kepada 2.045 orang dimana 1.500 orang menggunakan dana APBD sedangkan 545 orang lagi menggunakan APBD Kab./Kota. Penyuluhan dan bimbingan jabatan adalah proses memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai Program pelatihan Kerja, Program Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi AKAD, AKL (dalam negeri) dan AKAN (Luar Negeri). Program Pemagangan Luar Negeri, Program Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja meliputi Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Guna, dll. Persyaratan Kerja, penjelasan mengenai jabatan/pekerjaan di dunia kerja, Sikap-sikap yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja. Calon pencari kerja atau siswa yang sudah disuluh dan melalui proses pengenalan psychotest bisa mengetahui minat, bakat dan kemampuan secara dini untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
- Telah dilaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja guna menginventarisir data pencari kerja terdaftar, data lowongan kerja dan data penempatan tenaga kerja pada 19 kab./kota yang berasal dari PPTKIS, LPTKS dan perusahaan-perusahaan dimana data pencari kerja terdaftar sebanyak 34.419 orang, lowongan kerja 7.171 orang.
- Seharusnya pelaksanaan Penyuluhan dan bimbingan jabatan ditujukan kepada mahasiswa dan siswa yang berada pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta. Akan tetapi disebabkan keterbatasan anggaran dan tingkat kebutuhan lembaga , baru hanya target SMK yang kita penuhi.
- Telah dilakukan juga Pengumpulan data lowongan kerja (Job cavansing) di perusahaan di Kab./Kota dengan angka lowongan 7.171 orang diatas. Data penempatan tenaga kerja sector formal diperoleh dari data IPK yang dikumpulkan Provinsi yang berasal dari 19 Kab./Kota. Untuk mengumpulkan dan mengelola data IPK sangat diperlukan petugas kab./kota yang handal dan professional. Untuk mencapai hal tersebut talah dilaksanakan bimbingan teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah IPK sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan dana APBD dan APBN.

Dalam pencapaian target indikator formal dan informal ditunjang oleh beberapa sub indikator antara lain :

) Sub indikator persentase peningkatan Mitra Jejaring Bursa Kerja

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Bursa Kerja yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh mitra kerja}} \times 100 \%$$

$$\text{Untuk perhitungan target} = 81 / 387 \times 100 = 20,93 \%$$

$$\text{Untuk realisasi} = 83 / 387 \times 100 = 21,44 \%$$

$$\text{Capaian realisasi} = 21,44 / 20,93 \times 100 = 102,43 \%$$

Tabel 3.13
Jumlah Bursa Kerja yang aktif :

No	Uraian kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah PPTKIS	14	perusahaan
2.	Jumlah LPTKS	51	perusahaan
3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus	18	BKK
	Jumlah	83	lembaga

Persentase Peningkatan Mitra Jejaring Bursa Kerja dengan target kinerja 20,93 % realisasi 21,44 % dan capaian kinerja 102,43 %, termasuk kategori “Sangat Baik” ini berarti peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja telah terjalin dengan baik melalui program kemitraan yang kondusif dan harmonis antara stakeholder terkait terutama pelaku penempatan kerja.

Dinas Tenaga Kerja baik Provinsi, maupun Kabupaten/kota selalu memprioritaskan tingkat serapan tenaga kerja sebagai sasaran kinerja masing kegiatan penempatan tenaga kerja. Untuk itu pengembangan jejaring kemitraan yang terpadu antara seluruh sektor yang merupakan strategi prioritas Dinas Propinsi menjadi kata kunci keberhasilan serapan tenaga kerja khususnya pada sektor informal.

Selain itu optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK), PPTKIS dan LPTKS, serapan tenaga kerja pada kegiatan Bursa Kerja tahun 2017 juga merupakan penyumbang tingkat serapan yang cukup signifikan dengan peserta 40 perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 1.669 lowongan kerja dapat diserap sebanyak 1.262 orang (75,62 %) pencari kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pihak perusahaan dalam ajang pameran kesempatan kerja, sedangkan PPTKIS telah berhasil menempatkan 1.500 orang tenaga kerja ke luar negeri melalui sistem AKAN,

sedangkan LPTKS telah berhasil menempatkan tenaga kerja dalam Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8.850 orang melalui sistem AKL.

Disamping itu Dinas Provinsi telah melakukan pembinaan terhadap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sehingga lembaga ini masih tetap eksis, dimana terdapat PPTKIS ada sebanyak 14 perusahaan dan LPTKS ada sebanyak 51 perusahaan.

Tabel 3.13
Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasata (LPTKIS)
yang dibina

NO	NAMA PPTKIS	KEPALA CABANG DAN ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB KANTOR PUSAT DAN ALAMAT	KETERANGAN
I	<u>KANTOR PUSAT PPTKIS</u>			
1	PT ANDALAN MITRA PRESTASI		H. TAFYANI KASIM Jl.S.Parman No. 80-82 Padang Telp.0751- 7059890 Fax.0751-444879	KEP.475/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat KEP.No.131 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012
II	<u>KANTOR CABANG PPTKIS</u>			
2	PT RASTANURA RAYANI SAPUTRA	FAULINA FACHRI Jl.Sisingamangaraja No.30 Kel.Simpang Haru Kec.Padang Timur Kota Padang Telp.0751 -7878738-7871806 Fax. 0751- 810183	Hj. TITIN HENRAYANI, SH Jl. Raya Bekasi KM 18 Taruna II No.19 Pulo Gadung Jakarta Timur 13930 Telp. 021 - 46828785-46828786	KEP.735/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.023/W3/D2/2007 Tgl. 15 Maret 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.376 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/328/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 26 September 2012
3	PT SAHARA FAJARINDO CORP.	HUSNIATI, S.Si Komp. Villa Permata Putri Blok Mawar No. 4 Kel. Tanah Sirah Piai nan XX Kec. Lubeg Padang.	CHAIRULSYAH SIREGAR Jl Kangkung No 16 Medan 20153 Telp. 061 4157621 - 4551305 Fax. 061 4152775	KEP.746/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.032/W3/D2/2007 Tgl. 22 Maret 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.386 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/284/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 31 Juli 2012
4	PT DIAN YOGYA PERDANA	YUSMARDI THALIB Jl Gajah Mada Gang Semeru Gunung Pangilun No 56 Padang Telp. 0751 - 447296 Fax. 0751 - 7854007	H. DARSUM, SE Jl Ring Road Selatan No 1 Sorowajan Panggung Harjo Yogyakarta 55188 Telp. 0274 - 450132/ 4112275 Fax. 0721 - 271915	KEP.567/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.159/W3/D2/2007 Tgl. 20 September 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.215 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/300/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 14 Septemeber 2012

5	PT SARIMADU JAYA NUSA	ERA SUSANTI, S.Sos Jl.Talang Betutu No. 2 Air Tawar Tunggul Hitam 085274874514	RIZKY HAMZAH Jl Soekarno Hatta No. 75 Kendal Jawa Tengah Telp. 0294-3689955 Fax. 0294-384800	KEP.757/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/101/C.1/2009 Tgl. 29 Juni 2009 Perpanjangan Pusat Kep. No.315 Tahun 2013 Tgl. 25 November 2013 Perpanjangan Kacab 561/35/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 14 Mei 2014
6	PT. ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI	RICE WAHYUNINGSIH, SE Jln Gajah Mada No. 15 A Padang Telp. 0751- 446102 Fax. 0751 - 443029	JANURA ADMON Jl. Siderejo Ujung No. 111 Dumai.	KEP.218/MEN/V/2007 Tgl. 21 Mei 2007 KEP.560/94/Nakertrans/ D2/2008. Tgl. 18 Januari 2008 Perpanjangan Pusat Kep.No.252 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/329/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 26 Septemeber 2012 KEP.641/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/2267/Nakertrans/ D2/2008. Tgl. 29 Agustus 2008 Perpanjangan Pusat Kep.No.287 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/506/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 11 Desember 2012
7	PT KARYA ANTAR BANGSA ISEJATI (KABASCO)	BURHANUDDIN Jl. Padang-Bukittinggi Km 21 Pasar Baru Grosir Kasang No.P-4 Kab. Padang Pariaman Telp. 0751 - 484081	ISMAIL SUMARYO Jl Jati Makmur Raya No. 8 RT.06/08 Pondok Gede Bekasi Telp. 021-84990037 / 84977030	KEP.94/MEN/II/2007 Tgl. 06 Februari 2007 561/69/C.1/2010 Tgl. 19 April 2010 Perpanjangan Pusat Kep.No.260 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/309/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 24 September 2012
8	PT.HIDAYAH INSAN PEKERJA	Diah Witianingsih Jln. Perintis Kemerdekaan No. 48 Padang Telp. 0751 - 810977 Fax. 0751 - 810977	ERWIN CHAIRUMAN Jln. Batu Ampar I 45 A Kramat Jati Jakarta Jakarta Timur Telp. 021 - 80887831 Fax. 021 – 80887249	KEP.535/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/171/C.1/2010 Tgl. 11 Oktober 2010 Perpanjangan Pusat Kep.No.183 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/366/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 11 Oktober 2012
9	PT BINA KRIDATAMA LESTARI	HARDESNI Jln. Gandaria No. 28/41 Jati Baru Padang	SARDJUNIS Jl.Hang Tuah Gang Harapan I No.1 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 37510 Fax. 0761 38538 – 33742	KEP.728/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.403 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/297/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 31 Agustus 2012
10	PT SRITI RUKMA LESTARI	SYAMSUL BAHRI Jln. Raya Ampang No. 16 Padang	LAIMENA NELLY Jln. Joglo Baru 17 A Jakarta Selatan Telp. 021- 58901826-68472101 Fax. 021-5854069	

11	PT SUKSES MANDIRI UTAMA	ELWATRI MIHANDRI Ds. Titian Akar Kel. Buayan Kec. Btg Anai Kab. Padang Pariaman Hp. 081267713377	Ir. TALIHADAT BAZATOGU HIA Komp. Taman Bougenvile Blok A No. 18 Caman Bekasi Telp.6221-86463534 Fax.6221-8645818	KEP.772/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.403 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/137/C.1/PPTKIS/2013 Tgl. 20 September 2013
12	PT SERE MULTI PERTIWI	YUTRISNA Ds. Punggung Lading Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman 0751 - 93212	ELFILA RIVAI Jl. Sendok No. 39 Ayahanda Medan Telp.061-4522980 / 41456696 Fax 6221-8645818	KEP.761/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.571 Tahun 2012 Tgl. 18 Juli 2012 561/154/C.1/PPTKIS/2013 Tgl. 19 Desember 2013 KEP.459/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.116 Tahun 2013 Tgl. 17 April 2013 561/06/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 17 Februari 2014
13	PT AL WIHDAH JAYA SENTOSA	GUSNAIDI MALIN MARAJO Jln. Jati Baru No. 159 Kel. Jati Kec. Padang Timur 0751 - 7846045	FACHRI SYAHRUDDIN, SE Jln. Setia Budi No. 74 C Medan 061 - 8215444 / 8210324	KEP.259/MEN/2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/27/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 28 April 2014
14	PT HEROTAMA INDONUSA	MASRIZAL, SH Jl. Raya Padang - Bukittinggi Pasar	Drs. WISNU WISAKSONO, MM, MBA Jl. TB. Simatupang No. 6 Jatipadang	

Tabel 3.14
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasata (LPTKS) yang dibina

NO	NAMA LPTKS	NAMA PIMPINAN / KEPALA	A L A M AT	NOMOR / TANGGAL SIUP
I.	KOTA PADANG			
1	PT.ANDALAN MITRA PRESTASI	TAFYANI, B.Sc	Jl. S.Parman No.80-82 Padang Telp.0751-7059890 Fax.0751-444879	KEP. 011/W.3/D/2005 Tgl. 25 Januari 2005 113-019/03.06- 2/SIUP/IV/10-Prob.Tgl.3-4- 2010
2	KOPERASI KARYAWAN KANTOR WILAYAH USAHA POS II PADANG	FERDINAL	Jl. Khatib Sulaiman Padang Telp. 0751 - 51532 HP. 08126627688	KEP. 011/W.3/D.1/2007 Tgl. 30 Januari 2007 PERPANJANGAN 561/05/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 08 Februari 2012
3	PT.SHANDHY PUTRA MAKMUR PERWAKILAN PADANG	JHON RIZAL, SE	Jl.Taman Siswa No. 2 Komp.Telkom Padang 0751-7054442, 7056932 Fax.0751- 7056932	KEP. 011/W.3/D.1/2007 Tgl.27 Februari 2007 PERPANJANGAN 561/257/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 04 Juli 2012
4	PT.MITRA INSAN UTAMA CABANG PADANG	H.JUNIZAR MUCTAR, BE	Jl. Andalas Timur No.91 RT.01 RW.04 Padang	KEP. 020/W.3/D.1/2007 Tgl. 09 Agustus 2007 PERPANJANGAN 561/264/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 16 Juli 2012

6	PT. SAKINAH CITRA MULIA	YOLDAS YANTO	Jl. Utama Inanta No.8 Alai Timur Padang Telp.0751 - 447123,7834455 Fax. 0751 - 447123	561/001/D.1/2009 Tgl. 8 Januari 2009
7	KOPERASI KARYAWAN KERETA API	DASRIL	Jl. Stasiun No.1 Padang Tel. 0751 - 37345	561/003/D.1/2009 Tgl. 28 Januari 2009
8	PT. PUTRA JAYA TEKNIK	SYAMSUL BAHAR	Jl.Kampung Kelawi Barat No.19 Gang Bidan Murni Padang Telp. 0751 - 812253 - 7871303 Fax. 0751 - 33364	561/676/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 23 Maret 2009
9	PT. GRAMITA TRI UTAMA	HANDRI YANLI MAUMAR,SE	Jl. Andalas No.105 C Padang Telp.0751- 7820846 Fax. 0751 - 33298 HP.08126700396	561/1375/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 29 Juni 2009
10	KOPERASI BARA MANDIRI (KBM)	GIFNIL IMRON	Jl. Tanjung Periuk No.1 Teluk Bayur Padang HP.081363491649	561/1564/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 21 Juli 2009
11	KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) MERCURY	YUNITA.T	Jl. By Pass KM 6 Lubuk Begalung Padang Telp. 0751 - 77158	561/1728/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 3 Agustus 2009
12	PT. CAHAYA CITRA MULIA	DRS.AMSYARUDDIN,M.Ed	Jl.Ir. H. Juanda No.57 Padang	561/241/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 30 Nopember 2009
13	KOPERASI KARYAWAN SWADHARMA PADANG	H. HELMI SALIM, SE	Jl. Proklamasi No.35 Kel.Andalas Padang Telp.0751 - 30705 Fax.0751 - 812319 HP.081166 0659	561/266/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 8 Desember 2009
14	PT. SELAT BARU MANDIRI	REMON IRAWAN	Jl. Parkit III No.8 Air Tawar Padang Telp.0751 - 7055687	561/3110/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 28 Desember 2009
15	KOPERASI MANDIRI PEGAWAI PT. SUCOFINDO	MUSTAFA	Jl. Batang Agam No.7 Padang Telp.0751 - 443100,442920,443509 fax. 0751 - 444730	561/32/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 23 Februari 2010
16	KOPERASI KARYAWAN PT. ASKES SUMBAR	H.ERWIN ROMEL	Jl. Khatib Sulaiman No.52 Padang Telp. 0751 - 7055976 Fax. 0751 - 7055976	561/59/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 31 Maret 2010
18	KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL CAB.PADANG	BUDI YUSASTRA	Jl. Jhoni Anwar No.2 Kel.Ulak Karang Padang Telp.0751 - 444814 Fax.0751 - 445389	561/108/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 10 Juni 2010

19	PT. ENERGI CAHAYA	ERIZON	Jl.Bangdes No.50 Rt.01 Rw.04 Kel.Anduring Kec.Kuranji Padang Telp.0751 - 840510	561/133/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 13 Juli 2010
20	KOPERASI KARYAWAN PT.TASPEM (KOPKARTASPA)	MAIZONRIZANDA	Jl.Jenderal Sudirman No.63 Padang Telp. 0751 - 31152	561/180/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 14 Oktober 2010
21	PT. PINMAS MITRA TUNGGAL	FERITA ERLINDA	Jl.Dr.Sutomo No.69 C Padang Telp. 0751 - 7890555	561/195/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 15 Nopember 2010
22	PT.RAPINA PERKASA ABADI	RIDWAN AGUSTAMI	Jl.Dr.Sutomo No.69 Padang Telp. 0751 - 7890555	561/196/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 16 Nopember 2010
23	PT. SYAFINDO JAYA UTAMA	H.M.SYAFRIL HUDA	Jl.Maransi Indah No.129 Padang Telp. 0751 - 461668 - 463110	561/3231/C.1/LPTKS/10 Tgl. 03 Desember 2010
24	PT. PINCURAN MACU SEJAHTERA	ASMARSON,Amd	Komplek Polamas Blok B/4 Padang Telp. 0751 - 7848838 Fax. 0751 - 35797	561/05/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Januari 2011 Perpanjangan
25	PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA	DARWINSYAH, AL	Jln. S. Parman No. 130 B Lt.2 Padang Telp. 0751 - 444723	561/14/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 17 Februari 2011
26	KOPERASI SERBA USAHA KELUARGA BESAR BPD SUMBAR	ASRIWANDI MAKSUM	Jl.Pemuda No.23 Padang Telp. 0751-7530268	561/25/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 03 Maret 2011
27	KOPERASI KARYAWAN INSAN ELEKTRIKA (PT. PLN Persero) Padang	DJUFRI MADJID	Jln. S. Parman No. 221 Ulakkarang Padang Telp. 0751 - 7054688 Fax. 0751 - 7055067	561/35/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 17 Maret 2011
28	KOPERASI KARYAWAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK SUMBAR	ADRIAN ADHA	Jln. Rasuna Said No. 107 Padang Telp. 0751 - 7054106 Fax. 0751 - 446972	561/62/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 29 April 2011 Perpanjangan
29	PT.MAJU BERSAMA MANDIRI	NOVRIMELDA	Jln. Menado Blok N/7 Asretek Padang Telp. 0751 - 7881717	561/139/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 18 Agustus 2011 Perpanjangan
31	PT. ANDALAN MANPOWER TRI KONSULTAN	SYAFRI BUJANG, SH	Jln. S. Parman No. 80 - 82 B Lt.2 Padang Telp. 0751 - 40256 Fax. 444879	561/149/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 6 Oktober 2011
32	PT. GRAHA MEDISINDO UTAMA	ANDI SYAHPUTRA, SE	Jln. Belibis No.15 Air Tawar Barat Padang Telp. 0751 - 7050930 - 99003122	561/167/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Oktober 2011

33	PT. MULTI MEDIA CITRA	FEBRIAN MAYOSKA, SE	Jln Puma No. 3 Kel.dadok Tunggul.Hitam Kec.Koto Tengah Padang Telp. 0751-9062088 Fax. 0751-462546	561/03/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 26 Januari 2012
34	PT. CASTERO DWIVAZ	FEBI YERICHA, SH	Jln. Veteran No. 44 B, Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Padang Tep. 0751-7855155 Fax. 0751-841287	561/208/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 06 Februari 2012
35	PT. KUANTAN INDAH SEJAHTERA	DJUFRI MADJID	Jln. Merpati No. 11 Andalas Padang Telp. Fax.0751 - 24501	561/06/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 09 Februari 2012
36	PT. WIRATAMA JAGAT PERKASA	SUTRISNO ABU BAKAR,SE	Jln.Citarum No. 37 Kel. Alai Parak Kopi Padang	561/057/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 19 Maret 2012
37	PT. KHAS PRIMA ABADI	HARDI	Jln.Menado Blok N, No. 7 Padang Hp. 081363205322	561/365/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 11 Oktober 2012
38	PT. BAPURA DINAMIKA	NELI PURWANTI	Komp.Pondok Permai Jl. Rajawali Blok.S No.3 Kel. Limau Manis Ulu Gadut Padang Hp. 081266358782	561/33/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 26 Maret 2013
39	PT.GITO PERDANA SEJAHTERA	NURWILIS	Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.12 Tabing Padang	KEP. 014/W.3/D.1/2007 Tgl. 29 Maret 2007 PERPANJANGAN 561/06/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 22 Januari 2013
II.	KOTA SAWAHLUNTO			
40	PT. KHARISMA KARYA SEJAHTERA	Ir.HERRY SOEKISWANTORO	Jl.Prof.Dr.M.Yamin,SH Talawi Sawahlunto Telp. 0754 - 410632	561/77/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Mei 2011 Perpanjangan
41	PT. LENTERA AGUNG	SUKIMAN	Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kec. Talawi Kota Sawahlunto Telp. Fax. 0754-410685	561/07/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 09 Februari 2012
43	PT. PUTRA TUNGGAH INSANI	M. IQBAL	Jl. Sumatera Gg.I No.62 Kel. Tanah Lapang Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto	561/05/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 22 Januari 2013
III.	KAB. AGAM			
44	PT. INDO GRAHA CIPTA	H.AFRIAN, SE	Kapeh Panji Nagari Taluak IV Suku Kec.Banu hampu Kab.Agam Telp. 0752 - 720420	561/231/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 27 September 2010

45	KOPERASI HYDRO UTAMA (Koperasi Pegawai PT.PLN Sektor Bukittinggi)	ISNADI DT.SINARO BATUAH	Padang Luar Nagari Padang Luar Kec. Banuhampu Kab. Agam Telp. 0752 - 33663 Fax. 0752 - 33103	561/18/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 22 Februari 2011
46	PT. MITRA INTI MANAGEMEN	DESSY	Jl. Kapas Panji Km.3 Bukittinggi Telp. 0752 - 627966	561/485/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 07 Desember 2012 Perpanjangan
IV.	KAB. PADANG PARIAMAN			
47	KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA PT.ANGKASA PURA II	TAUFIK AZIZ, SH	Bandara Internasional Minangkabau Kec. Batang Anai Telp. 0751 – 7873943	561/95/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 31 Mei 2010
48	PT. TRIO UTAMA PARIAMAN	RUSLI UMAR	Kuranji Hilir Sungai Limau Kab.Pdg Pariaman Telp. 0751 - 91999 Fax. 0751 - 93339	561/143/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 22 Agustus 2011 Perpanjangan
V.	KOTA SOLOK			
49	PT. MITASINUS	KHUSAIRI	Jl. Manggis No.15 Simpang Rumbio Solok Telp. 0755 - 7707939 Fax. 0755 – 20383	561/002/D.1/2009 Tgl. 27 Januari 2009
VI.	KAB. SOLOK			
50	PT. PRIMA ANDALAS PERMAI	I F D A L	Jl. Raya Solok- Padang Km.23 Kayu Aro Kec. Gn. Talang Kab. Solok Gn. Talang Kab. Solok	561/96/C.1/LPTKS/2014 Tgl. 17 Oktober 2014
VII.	KAB. PESISIR SELATAN			
51	PT. ZALMI TEGUH SEJATI	H. INMIRZAL	Jl. Raya Api - Api Pasar Baru Bayang Kab.Pessel Telp.0756 - 441071 HP.08126624461	561/1374/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 29 Juni 2009

Dalam rangka optimalisasi penyerapan lulusan SMK di Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan telah membuat Mo.U Pemberdayaan Lulusan SMK. Kesepahaman ini memberikan kesempatan kepada Lulusan untuk dapat menerima Informasi Kerja dan Pelayanan Antar Kerja langsung melalui optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di SMK-SMK.

Dengan program meningkatkan kualitas dan kuantitas Bursa Kerja Khusus di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi Pejabat/petugas SMK di Kab./Kota mengenai pelaksanaan Bursa Kerja Khusus yang orientasinya langsung mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD. Adapun lembaga SMK yang sudah mendirikan BKK pada tahun 2017 ini tercapai sebanyak 20 BKK dari target 10 buah BKK. Diharapkan Pejabat/petugas BKK di SMK sudah bisa menempatkan lulusannya ke dunia kerja dengan

kegiatan antar kerja yang dilaksanakan di SMK, karena BKK adalah perpanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja Kab./Kota .

Bimbingan Teknis Pengelolaan BKK selain diberikan kepada petugas BKK di SMK-SMK juga ditujukan kepada Pejabat/Petugas di lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS), supaya semua Perguruan Tinggi dan LPKS juga bisa mendirikan BKK .

Tabel 3.15
Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dibimbing

No	NAMA SMK	Berdiri BKK	Berdiri BKK
1	SMK.N.1 Painan	Sudah berdiri tahun 2016	-
2	SMK.Teknologi Lengayang	Sudah berdiri tahun 2016	-
3	SMK N 1 Sijunjung	Sudah berdiri tahun 2016	-
4	SMK N 2 Sijunjung	Sudah berdiri tahun 2016	Jl. Lubuk Basung Agam
5	SMK.N.1 Batu Sangkar	Sudah berdiri tahun 2016	-
6	SMK.Perbankan Bougenvile	Sudah berdiri tahun 2016	-
7	SMK.N.Baso Agam	Sudah berdiri tahun 2016	-
8	SMK.N.1 Kec. Guguk	-	Sudah berdiri tahun 2017
9	SMK.N.1 Lubuk Sikaping	-	Sudah berdiri tahun 2017
10	SMK.N.1 Solok Selatan	Sudah berdiri tahun 2016	-
11	SMK.N.1 Kinali	-	Sudah berdiri tahun 2017
12	SMK.N.2 Padang	Sudah berdiri tahun 2016	-
13	SMK.N.9 Padang	Sudah berdiri tahun 2016	-
14	SMK.Nusatama Padang	Sudah berdiri tahun 2016	-
15	SMK.N.2 Kota Solok	Sudah berdiri tahun 2016	-
16	SMK.N.2 Sawahlunto	-	Sudah berdiri tahun 2017
17	SMK N. 1 Padang Panjang	Sudah berdiri tahun 2016	-
18	SMK N.1 Bukittinggi	Sudah berdiri tahun 2016	-
19	SMK N 1 Payakumbuh	Sudah berdiri tahun 2016	-
20	SMK N 3 Kota Pariaman	Sudah berdiri tahun 2016	-

Untuk meningkatkan peranan mitra lembaga penempatan tenaga kerja sangat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengotimalkan peranan Pejabat/petugas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kab./Kota untuk melakukan pelayanan IPK dan pembinaan antar kerja. Terdapat fungsional pengantar Kerja sebanyak 11 (sebelas) orang di Provinsi, 7 (tujuh) orang fungsional pengantar kerja di Kota Padang. Untuk peningkatan pelayanan fungsional pengantar kerja serta peningkatan kuantitas pengantar kerja telah dilaksanakan sosialisasi jabatan fungsional jabatan pengantar kerja bagi pejabat Dinas Tenaga Kerja Prov./Kab. Kota, BKD Prov./Kab./Kota dan Sekda Prov/Kab./Kota sebanyak 60 orang dengan menggunakan dana APBN. Dari sosialisasi ini sangat diharapkan aparat segera memproses jabatan fungsional pengantar kerja di Kab./Kota sehingga lembaga mitra Disnaker sebagai perpanjangan tangan bisa melakukan kegiatan antar antar sebagaimana mestinya.

Telah dilaksanakan Jejaring (Networking) Kerjasama di Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Bagi Instansi Terkait Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang meliputi Pimpinan PPTKIS, LPTKS, BKK dan Perusahaan Pengguna guna meningkatkan koordinasi diantara pemangku kepentingan atau instansi terkait bidang penempatan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja kepada masyarakat atau pencari kerja. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBN. Lembaga Bursa Kerja yang aktif ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal.

Untuk pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan pencapaian indikator antara lain Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Informal, beberapa penilaian dilakukan seperti kegiatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Negara.

Tabel 3.16
Perbandingan dengan Provinsi lainnya terlihat sebagai berikut

No	Provinsi	Indikator	Nilai tahun 2016
1.	Bengkulu	Tingkat kesempatan Kerja	95,09
2.	Sumatera Barat	Tingkat kesempatan Kerja	93,11
3.	Jambi	Tingkat kesempatan Kerja	95,11

- III. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang terdiri dari 2 (dua) indikator.

1) Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Jumlah kasus yang masuk}}{\text{Jumlah perusahaan}}$$

$$\text{Untuk perhitungan target} = 180/3.695 \times 100 \% = 4,87 \%$$

$$\text{Untuk realisasi} = 166/3.699 \times 100 \% = 4,49 \%$$

$$\text{Capaian realisasi} = 4,49/4,87 \times 100 = 92,20 \%$$

Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial dengan target 4,87 %, realisasi 4,49 % dan capaian kinerja sebesar 92,20 %. Untuk indikator Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial kategori “Baik”.

Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja, dalam perjalanannya sudah harmonis, dan peraturan yang telah disampaikan Provinsi telah diterapkan di perusahaan, hal inilah penyebab terjadinya penurunan perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diawali dengan penyelesaian secara Bipartit, jika para pihak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan maka akan dituangkan dalam Persetujuan Bersama (PB) namun jika para pihak tidak sepakat dengan jalan damai maka perselisihan dicatatkan ke Dinas Kab/Kota yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Tabel 3.18
Kasus perselisihan Hubungan Industrial tercatat pada tahun 2017

NO	Jenis Penyelesaian	Kasus
1.	Perjanjian Bersama	87 kasus
2.	Anjuran	47 kasus
3.	Bipartit	58 kasus
	Jumlah	169 kasus

Kasus perselisihan tersebut di atas adalah merupakan kasus perselisihan yang dicatat kan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten /Kota maupun Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat, karena para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan melalui perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan, sehingga pihak yang tidak puas mencatatkannya ke Kabupaten /Kota.

Dari 169 kasus perselisihan tersebut di atas, 87 kasus dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama jika dalam hal salah satu pihak tidak menerima anjuran,

maka dapat mengajukan penyelesaiannya melalui banding ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial ini sebenarnya tidak dapat diprediksi atau diperkirakan jumlahnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pelambatan pergerakan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya pemahaman terutama pihak pekerja terhadap peraturan perundang-undangan serta pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pekerja.

- 2) Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Formulasi =

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

$$\text{Untuk perhitungan target} = 154.465 / 2.180.330 \times 100 = 7,08 \%$$

$$\text{Untuk realisasi} = 169.910 / 2.180.336 \times 100 = 7,51 \%$$

$$\text{Capaian realisasi} = 7,51 / 7,08 \times 100 \% = 106,07 \%$$

Tabel 3.18
peserta BPJS Ketenagakerjaan

No	Uraian kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Peserta BPJS Cabang Kota Padang	94.092	orang
2.	Peserta BPJS Cabang Kota Bukittinggi	42.096	orang
3.	Peserta BPJS Cabang Kota Solok	27.722	orang
	Jumlah	169.910	orang

Target kepesertaan tenaga kerja aktif pada program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 7,08 %, terealisasi sebanyak 7,51 %, dengan capaian kinerja 106,07% termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.20 : perbandingan indikator persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS dengan Provinsi Lain (Indek Pembangunan Ketenagakerjaan)

Tabel 3.19
Perbandingan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Provinsi terdekat

No	Provinsi	Indikator	Nilai tahun 2016
1.	Riau	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	188,86
2.	Jambi	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	119,22
3.	Sumatera Barat	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	86,97

IV. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- 1) Persentase perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan.

Formulasi Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang memenuhi peraturan per UU}}{\text{Jumlah perusahaan tahun sebelumnya}}$

Untuk Perhitungan Target = $1.815 / 3.840 \times 100 = 47,26 \%$

Untuk Realisasi = $1.865 / 3.840 \times 100 = 48,56 \%$

Capaian Realisasi = $48,56 / 47,26 \times 100 = 102,75 \%$

Untuk Indikator persentase perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan.dengan target 47,26 % realisasi 48,56 % dengan capaian kinerja 102,75 % sehingga capaian kinerja meningkat, disebabkan jumlah perusahaan yang telah melaksanakan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan nomor : 13 Tahun 2003 yang target awal jumlah perusahaan yang memenuhi peraturan pe UU 1.815 perusahaan setelah pada akhir Desember 2017 meningkat menjadi 1.865 karena meningkatnya kesadaran dan pemahaman dari pimpinan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap pembinaan dan pengawasan serta memberikan Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan dilakukan melalui penegakan hukum, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik/pimpinan perusahaan dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil laporan Permen 09/V/2004 triwulan IV terjadi kenaikan penambah perusahaan yang diperiksa dari 1.815 menjadi 1.865 perusahaan namun jumlah perusahaan yang telah terdaftar yaitu 3.840 perusahaan. Untuk peraturan Ketenagakerjaan, adalah merupakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana isi dari peraturan perundang-undangan memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dipahami dan dilaksanakan, disamping itu pemerintah dalam hal ini Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi bersama Kabupaten/Kota.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang peraturan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakanya oleh perusahaan yang ada. Untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dengan pengusaha,

dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan melalui beberapa program dan kegiatan antara lain :

Z Melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, dengan kegiatan antara lain

- Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak di Kab/kota.
- Pengawasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kab/Kota.
- Penyidikan kasus pelanggaran di bidang ketenagakerjaan.

Z Melalui dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, inti dari kegiatan ini untuk menyampaikan hal normatif yang harus dilaksanakan di perusahaan, dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui pemeriksaan/pengujian secara berkala terhadap peralatan dan mesin tenaga produksi yang ada di perusahaan serta mengidentifikasi potensi bahaya dan penyakit akibat kerja dengan kegiatan antara lain :

- Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
- Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- Pendataan P2K3

- Tabel 3.20

- Perbandingan Indikator Persentase Perusahaan yang melakukan Peraturan Perundang-undangan dengan Provinsi terdekat

No	Provinsi	Indikator	Nilai tahun 2016
1.	Bengkulu	Tingkat Peraturan Perundang-undangan	9,69
2.	Aceh	Tingkat Peraturan Perundang-undangan	9,25
3.	Sumatera Barat	Tingkat Peraturan Perundang-undangan	4,73

2) Persentase perusahaan yang melakukan SMK3

Formulasi = $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang melaksanakan SMK3}}{\text{Jumlah perusahaan yang wajib SMK3}}$

Jumlah perusahaan yang wajib SMK3

Untuk Perhitungan Target = $\frac{28}{263} \times 100 = 10,64 \%$

Untuk Realisasi = $\frac{28}{263} \times 100 = 10,64 \%$

Capaian Realisasi = $\frac{10,64}{10,64} \times 100 = 100 \%$

Sehubungan Peraturan Pemerintah (PP) nomor. 50 tahun 2012 bahwa yang wajib melaksanakan SMK3 adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih dan memiliki resiko kerja yang tinggi.

Oleh karena masih sulitnya penataan terhadap pemenuhan SMK3 di perusahaan maka untuk target penerapan SMK3 perlu dilakukan pembinaan secara bertahap dan kontiniu. Namun diharapkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk tahun 2017 ini ditargetkan yang dapat memenuhi SMK3 sebesar 28 (dua puluh delapan) perusahaan. SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Formulasi tersebut diatas dilakukan melalui UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian target per indikator persentase perusahaan yang melakukan SMK3 dilakukan pemeriksaan, pengujian dengan formulasi sbb :

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan kesehatan kerja yang diperiksa}}{\text{Jumlah perusahaan Kab/Kota}}$$

Untuk perhitungan target	= 1,23 %	
Untuk realisasi	= 135/3.111 x 100 %	= 3,48 %
Capaian realisasi	= 3,48/1,23 X 100	= 282,9 %

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Jml perusahaan yang diperiksa}}{\text{Jumlah pengujian lingkungan yang diperiksa}} \times 100 \%$$

Untuk perhitungan target	= 1,17 %	
Untuk realisasi	= 12/1.848 x 100 %	= 1,54 %
Formulasi perhitungan	= $\frac{\text{Jml perusahaan yang diuji}}{\text{Jumlah perusahaan Kab/Kota}} \times 100 \%$	

1. Pemeriksaan Kesehatan Kerja

Pemeriksaan Kesehatan Kerja meliputi pemeriksaan visus mata, pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri), pemeriksaan fungsi paru (Spirometri), pemeriksaan tingkat kelelahan dan pemeriksaan kesegaran jasmani.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk 1700 orang tenaga kerja pada

perusahaan/UMKM di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yakni :

) Pemeriksaan visus mata, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

a) Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor
- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
- Haris Motor
- Bengkel Yamaha
- Pondok jati
- Karya Teknik Las
- Bengkel anak Salido
- Painan Karya

b) Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station

c) Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru

- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

d) Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot
- AT Perabot
- Fajar Teknik

e) Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)
- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa visus mata nya berjumlah 361 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 236 orang dalam keadaan normal matanya, sedangkan 125 orang perlu koreksi.

Karna masih banyaknya tenaga kerja yang mengalami gangguan visus mata, maka perlu diberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap paparan debu/asap bahan kimia terhadap tenaga kerja.

J) Pemeriksaan Fungsi Pendengaran (Audiometri), dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

a) Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor

- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
- Haris Motor
- Bengkel Yamaha
- Pondok jati
- Karya Teknik Las
- Bengkel anak Salido
- Painan Karya

3) Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station

4) Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru
- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

5) Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot

- AT Perabot
- Fajar Teknik

6) Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)
- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa fungsi pendengarannya (audiometri) nya berjumlah 353 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan gangguan pada fungsi pendengaran telinga sebelah kiri sebanyak 244 orang dan pada telinga kanan sebanyak 256 orang, yang artinya hanya 73% fungsi pendengaran tenaga kerja tersebut dalam keadaan normal.

Dari asil pantauan langsung penyebabnya adala akibat paparan kebisingan pada lingkungan kerja mereka, dan tidak patuhnya terhadap pemakaian alat pelindung diri (APD).

) Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometri), dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Spirometri adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor
- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
- Haris Motor
- Bengkel Yamaha
- Pondok jati
- Karya Teknik Las
- Bengkel anak Salido

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Spirometri adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Spirometri adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru
- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Spirometri adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot
- AT Perabot
- Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Spirometri adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)

- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa fungsi parunya (Spirometrinya) nya berjumlah 359 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 327 orang dalam keadaan normal fungsi parunya, sedangkan 7 orang mengalami gangguan obstruksi, 20 orang gangguan resriksi dan 5 orang gangguan campuran (obstruksi Restriksi).

) Pemeriksaan visus mata, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor
- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
 - Haris Motor
 - Bengkel Yamaha
 - Pondok jati
 - Karya Teknik Las
 - Bengkel anak Salido
 - Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station
-

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru
- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot
- AT Perabot
- Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan visus mata adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)
- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa visus mata nya berjumlah 361 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 236 orang dalam keadaan normal matanya, sedangkan 125 orang perlu koreksi.

Karna masih banyaknya tenaga kerja yang mengalami gangguan visus mata, maka perlu diberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap paparan debu/asap bahan kimia terhadap tenaga kerja.

2. Pemeriksaan Kelelahan Kerja, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kelelahan kerja adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor
- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
- Haris Motor
- Bengkel Yamaha
- Pondok jati
- Karya Teknik Las
- Bengkel anak Salido
- Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kelelahan kerja adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station
-

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kelelahan kerja adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru
- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kelelahan kerja adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot
- AT Perabot
- Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Kelelahan kerja adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)
- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa Kelelahan kerjanya nya berjumlah 306 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 32 orang mengalami tingkat kelelahan ringan dan yang mengalami tingkat kelelahan sedang 7 orang.

) Pemeriksaan Kesegaran Jasmani, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Kesegaran Jasmani adalah:

- SPBU 14256 561 Sago Painan
- Bengkel Yal Service
- Bengkel Anita Surya Motor
- Bengkel Surya Sukses
- Perabot Jati Bus
- Haris Motor
- Bengkel Yamaha
- Pondok jati

- Karya Teknik Las
- Bengkel anak Salido
- Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kesegaran jasmani adalah:

- SPBU 14264 527 Manggopoh
- SPBU 14264 574 Simpang Tembok
- SPBU 14264 566 Bangkaweh
- SPBU 14261 532 Gadut
- SPBU 14261 580 Candung
- Biaro Auto Centere
- Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Kesegaran jasmani adalah:

- SPBU 14263 452 (PT. Berkah)
- SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)
- Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De
- PT. Sejati Pasaman
- CV. Cahaya Baru
- UD. Yoanda
- CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan Kesegaran jasmani adalah:

- Indah Jaya Las
- Aulia Perabot
- Nur Perabot
- Cengkaren Jaya Abadi
- In Perabot
- AT Perabot
- Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakukan pemeriksaan kesegaran jasmani adalah:

- Dolas Songket
- Kerupuk Kubang
- Payung Kote Talawi
- Karya Bunda (Anyaman Bambu)
- Tahu Pak Sempu
- Jembatan Merah
- Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota yang di periksa Kesegaran Jasmaninya nya berjumlah 343 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 44 orang yang mempunyai tingkat kesegaran Jasmani sangat baik, 266 orang memiliki tingkat kesegaran jasmani baik, dan 18 orang dalam keadaan cukup serta 6 orang dalam keadaan sedang.

2. Pengujian Lingkungan Kerja

Pengujian Lingkungan Kerja meliputi : pengujian lingkungan kerja kadar debu total, pengujian lingkungan kerja pencahayaan, pengujian lingkungan kerja kebisingan, pengujian lingkungan kerja Gas/Uap dan pengujian lingkungan kerja iklim panas.

Kegiatan pengujian lingkungan kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan untuk 2132 sampel pada 33 perusahaan UMKM yang tersebar 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yakni :

Pengujian Kadar Debu Total di tempat kerja, dilaksanakan pada 33 perusahaan di 6 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Padang pariaman:

- Ali Teknik, Kab. Padang Pariaman
- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman
- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

Kabupaten Lima Puluh Kota:

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota
- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota
- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

Kota Payakumbuh:

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh
- MUTIA, Kota Payakumbuh
- Neng Keke, Kota Payakumbuh

Kabupaten Agam:

- Royal Ban, Kab. Agam
- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam
- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Usaha SRM (Sarojo Mandiingin), Bukittinggi

Kabupaten Pasaman:

- CV. Dharma Kartapura
- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman
- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman
- Kipang Palut Bonjol "ITA", Kab. Pasaman
- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman
- Usaha Keluarga "Denai" Bonjol Pasaman
- Matahari, Kab. Pasaman
- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota
- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota
- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota
- Erika, Kota Payakumbuh
- Usaha Utama, Kota Payakumbuh
- Putri Caniago, Kota Payakumbuh
- Tirta Mutiara, Kab. Agam
- Kreatif Jaya, Kab. Agam
- PT. Bakapindo, Kab. Agam
- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman
- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman
- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kadar debu total di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja

Pengujian Lingkungan Kerja Penerangan/Pencahayaan, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- Ali Teknik, Kab. Padang Pariaman
- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman
- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman
- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota
- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota
- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota
- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh
- MUTIA, Kota Payakumbuh
- Neng Keke, Kota Payakumbuh
- Royal Ban, Kab. Agam
- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam
- CV. Dharma Kartapura
- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman
- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman
- Matahari, Kab. Pasaman
- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Usaha SRM (Sarojo Mandiingin), Bukittinggi
- Kipang Palut Bonjol "ITA", Kab. Pasaman
- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman
- Usaha Keluarga "Denai" Bonjol Pasaman
- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota
- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota
- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota
- Erika, Kota Payakumbuh
- Usaha Utama, Kota Payakumbuh
- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam
- Kreatif Jaya, Kab. Agam
- PT. Bakapindo, Kab. Agam
- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman
- CV. Rikson, Kab. Padang Pariaman
- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kerja tingkat penerangan atau pencahayaan di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja

Pengujian Lingkungan Kerja Fisik Kebisingan, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman
- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman
- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota
- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota
- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota
- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh
- MUTIA, Kota Payakumbuh
- Neng Keke, Kota Payakumbuh
- Royal Ban, Kab. Agam
- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam
- CV. Dharma Kartapura
- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman
- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman
- Matahari, Kab. Pasaman
- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Usaha SRM (Sarojo Mandiingin), Bukittinggi
- Kipang Palut Bonjol "ITA", Kab. Pasaman
- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman
- Usaha Keluarga "Denai" Bonjol Pasaman

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota
- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota
- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota
- Erika, Kota Payakumbuh
- Usaha Utama, Kota Payakumbuh
- Putri Caniago, Kota Payakumbuh
- Tirta Mutiara, Kab. Agam
- Kreatif Jaya, Kab. Agam
- PT. Bakapindo, Kab. Agam
- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman
- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman
- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kerja tingkat kebisingan di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja yakni tingkat kebisingan adalah 85 dBA untuk paparan 8 jam kerja perhari atau 40 jam kerja perminggu.

Pengujian Lingkungan Kerja Gas/Uap, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman
- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman
- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota
- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota
- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota
- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh
- MUTIA, Kota Payakumbuh
- Neng Keke, Kota Payakumbuh
- Royal Ban, Kab. Agam
- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam
- CV. Dharma Kartapura
- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman
- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman
- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Usaha SRM (Sarojo Mandiingin), Bukittinggi
- Kipang Palut Bonjol "ITA", Kab. Pasaman
- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman
- Usaha Keluarga "Denai" Bonjol Pasaman
- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota
- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota
- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota
- Erika, Kota Payakumbuh
- Usaha Utama, Kota Payakumbuh
- Putri Caniago, Kota Payakumbuh
- Tirta Mutiara, Kab. Agam
- Kreatif Jaya, Kab. Agam
- PT. Bakapindo, Kab. Agam
- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman
- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman
- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian I lingkungan kerja pengujian gas atau uap di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan .

Pengujian Lingkungan Kerja Iklim Kerja Panas, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman
- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman
- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota
- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota
- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota
- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh
- MUTIA, Kota Payakumbuh
- Neng Keke, Kota Payakumbuh
- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam
- CV. Dharma Kartapura
- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman
- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman
- Matahari, Kab. Pasaman
- Syukra Indah Teknik
- Cahaya Indah Aluminium
- Usaha SRM (Sarojo Mandiingin), Bukittinggi
- Kipang Palut Bonjol "ITA", Kab. Pasaman
- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman
- Usaha Keluarga "Denai" Bonjol Pasaman
- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota
- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota
- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota
- Erika, Kota Payakumbuh
- Usaha Utama, Kota Payakumbuh
- Putri Caniago, Kota Payakumbuh
- Tirta Mutiara, Kab. Agam
- Kreatif Jaya, Kab. Agam
- PT. Bakapindo, Kab. Agam
- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman
- CV. Rikson, Kab. Padang Pariaman
- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian lingkungan kerja pengujian iklim kerja panas di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja .

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja ke perusahaan yang ada di Kabupaten/kota, yakni : dilaksanakan pada Perusahaan menengah keatas yang ada di Kabupaten/Kota , sesuai dengan permintaan perusahaan yang bersangkutan sbb :

1. PT. Tidar Kerinci Agung
2. PT. Incasi Raya
3. PT. AMP Plantation
4. PMKT Pertamina TTBBM Padang
5. PT. GMP
6. PT. Pertamina Patra Niaga
7. PT. Kamu
8. PT. Kencana Sawit Indonesia
9. PT. Agrindo Indah Persada
10. PT. AMP I, AMP II, AMP III
11. PT. GMP POM dan GMP Estaate
12. PT. PHP I dan PHP II
13. PT. AMP Plantation
14. PT. PMJ
15. PT. AMP
16. PT,. Kencana Sawit Indonesia
17. PT. Trasco Pratam CRF
18. PT. PHP I
19. PT. PHP II
20. PT. GMP
21. PT. PANP
22. PT. AMP IV dan PMJ
23. PT. AMP III
24. PT.. AMP II
25. PT. AMP I
26. PT. AMP I Plasma 3
27. PT. AMP I Plasma
28. AMP I
29. PT. Megasawindo dan PT. Jamika Raya
30. PT. Kamu
31. PT. Mutiara Agam
32. PT. Wira Indo Mas Padang
33. PT. Kunango Jantan

34. PT. Kamu
35. PT. PHP I
36. PT. PHP 2
37. PT. GMP POM
38. PT. GMP Kebun
39. PT. PMJ
40. PT. PANP
41. PT. AMP 1 Plasma 1
42. PT. AMP 3
43. PT. AMP 2 Plasma
44. PT. AMP 2
45. PT. AMP 1 Plasma 4
46. PT. AMP1 Plasma 3
47. PT. AMP1
48. PT. AMP POM

Untuk indikator berkurangnya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dengan target untuk pengujian lingkungan kerja 1,17 % dan pemeriksaan 1,23 % dan capaian kinerja masing-masing baik untuk pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja menunjukkan kinerja “ Sangat Baik”

- V. Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan kawasan transmigrasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya

Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan yang memenuhi sarana dan pengembangan masyarakat}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi}} \times 100$$

$$\text{Untuk Perhitungan Target} = \frac{2}{5} \times 100 = 40,00 \%$$

$$\text{Untuk Realisasi} = \frac{2}{5} \times 100 = 40,00 \%$$

$$\text{Capaian Realisasi} = \frac{40,00}{40,00} \times 100 = 100 \%$$

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja sasaran strategis 5 dengan indikator kinerja persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya dengan target 40,00 %,

terrealisasi 40,00 %, dengan capaian kinerja 100 % sehingga menunjukkan kinerja “Sangat Baik”.

Untuk pencapaian sasaran strategis 5 yaitu Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya 5 Kawasan Transmigrasi sesuai arahan pusat yaitu :

1. Kawasan Aek Nabirong Kab. Pasaman Barat
2. Kawasan Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan
3. Kawasan Padang Tarok Kab. Sijunjung
4. Kawasan Koto Bangun Kabupaten Limapuluh Kota
5. Kawasan Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya

Hasil yang dicapai terhadap pengukuran kinerja ini adalah :

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran :

Bersama Sekretariat Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengadakan Rapat Penjaringan Program Tahun 2018 (regional Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara) bertempat di Padang dihadiri oleh utusan dari 13 provinsi dan 50. Kabupaten/kota, sehingga mendapatkan daerah yang memiliki potensi mendapatkan alokasi program pada T.A 2018.

2. Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan penyusunan Buku Data terhadap 2 calon lokasi/lokasi yang potensi untuk dikembangkan, yakni lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan lokasi Padang Hilalang SP.2 Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

3. Pembukaan Lahan

- a. Melakukan sisa pembayaran terhadap rekanan yang melaksanakan pembersihan lahan seluas 29 ha yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 melalui satker PKP2Trans Kabupaten Sijunjung.
- b. Melaksanakan pekerjaan Pembersihan Ulang Lahan Usaha I seluas 30 KK x 0,80 ha (24,00 ha) secara swakelola melalui masing – masing warga yang memiliki lahan yang diperuntukkan kepadanya.

4. Monitoring Pembangunan Permukiman

- a. Melakukan koordinasi terhadap rencana pelaksanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru lokasi Padang Hilalang SP.2
- b. Melakukan monitoring terhadap pembersihan ulang lahan usaha I yang dikerjakan secara swakelola oleh warga transmigrasi seluas 24,00 ha.

5. Sosialisasi Pembangunan Permukiman

Melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan permukiman transmigrasi, dengan mengundang pihak terkait di tingkat Kabupaten yang memiliki potensi untuk dikembangkan program transmigrasi, menghadirkan narasumber dari Ditjen Penyiapan kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Sasaran yang diharapkan adalah para peserta mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan pembangunan program transmigrasi dimasa yang akan datang.

6. Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan

Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap 2 (dua) areal transmigrasi yang telah memiliki Hak Pengelolaan Lahan untuk daerah yang potensi untuk dikembangkan serta melakukan koordinasi ke tingkat pusat.

7. Penetapan Kawasan Transmigrasi ;

- a. Menghadiri expose Pekerjaan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di Dinas Ketransmigrasian Kabupaten Sijunjung dan yang dilaksanakan di Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- b. Memfasilitasi diterbitkannya rekomendasi Gubernur Sumatera Barat terkait usulan Bupati Solok Selatan dan Bupati Sijunjung terhadap usulan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

8. Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , penandatanganan MoU tersebut adalah untuk rencana pelaksanaan Penempatan Transmigrasi Daerah Asal (TPA) sebanyak 100 KK melalui dana sharring APBD Provinsi Jawa Tengah.

9. Tahun Anggaran 2018 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi RI memprogramkan untuk Penataan Persebaran Penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 185 KK yang terdiri dari

1. Lokasi Padang Tarok Sp. 1 sebanyak : 160 KK
 2. Lokasi Padang Hilalang Sp. 2 sebanyak : 25 KK
10. Guna terlaksananya kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Tahun Anggaran 2018, diperlukan Dana penunjang untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD), baik dana Koordinasi dan juga dana penadatangan naskah MuO antar Provinsi dan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten.
11. Untuk tahun 2017 ada 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang tergabung dalam Tim pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman transmigrasi SP.1 Kabupaten Sijunjung Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan pembinaan di lokasi. 10 OPD tersebut adalah : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Dari 10 OPD Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi program kegiatan sesuai dengan bidang dan kewenangannya untuk pembinaan transmigrasi dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi ada 8 OPD yaitu :
- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatannya dalam proses ajar mengajar, untuk anak usia sekolah Transmigran (SD) ,belajar di SD Negeri Padang Tarok SP.1 .
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatan dalam proses layanan kesehatan untuk warga transmigran
 - c) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatan antara lain telah menugaskan

Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Kamang baru sebagai Pembina rutin pada masyarakat Transmigrasi pada SP 1 Padang Tarok. Ini dilakukan karena SP.1 Padang Tarok merupakan wilayah binaan dari Penyuluh Agama Kecamatan Kamang Baru, Berdasarkan pertemuan dengan Da'iyah SP 1 Padang Tarok disepakati bahwa akan dilaksanakan proses belajar membaca alqur'an bagi anak-anak yang ada di SP 1 yang akan ditinjau langsung oleh Penyuluh Agama Islam kecamatan Kamang Baru. Untuk pembinaan selanjutnya akan dilakukan secara rutin oleh Tim Pembina dari KUA kecamatan kamang Baru direncanakan dilakukan sekali dalam tiga bulan pada hari sabtu dan minggu.

- d) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan berupa pembuatan kolam 4 unit dengan ukuran 4 x 5 meter dari dana Padat Karya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.
- e) Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan bibit jagung untuk luasan lahan 25 Ha di Padang Tarok SP.1. Dan bantuan bibit kakao sebanyak 7.500 batang untuk ditanam di lahan Usaha I, dan pupuk 37,5 karung isi 50 kg/ karung.

Untuk Bidang Kesehatan hewan, akan melakukan upaya pencegahan penyakit zoonosis yaitu rabies dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga dan vaksinasi terhadap Hewan Penular rabies (HPR) di Padang Tarok SP.1. Selain itu pembinaan dan bimbingan kesehatan hewan baik dari Bidang Kesehatan Hewan maupun dari UPTD Pusat kesehatan Hewan (Puskeswan) Kiliran Jao.

- f) Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan benih ikan nila gratis berapapun yang dibutuhkan per kelompok/ perorangan asalkan kolamnya sudah ada dan sesuai persyaratan/ petunjuk yang diberikan Dinas Pangan dan Perikanan karena masyarakat Transmigran Padang Tarok SP.1 memiliki potensi perikanan.
- g) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung (Parpora) Untuk Sektor Olah raga Dinas Perpora membina dan mengembangkan olah raga masyarakat berupa pembinaan, pelatihan dan bantuan fasilitas

latihan. Bantuan yang diberikan untuk Padang Tarok SP.1 berupa : net Volly, bola Volly 1 set, Net takraw dan bola takraw 1

- h) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai program memberikan bantuan alat kontrasepsi disetiap Klinik KB. Untuk Padang Tarok SP. 1 masuk Kecamatan Kamang Baru, di Puskesmas Aie Amo Kecamatan Kamang Baru ada petugas PLKB binaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyarankan agar petugas Paramedis Padang Tarok SP.1 (Poniman, S.ST), meminta alat kontrasepsi yang ada di Puskesmas Aie Amo sesuai permohonan yang diajukan melalui PLKB Kecamatan Kamang Baru untuk pasangan usia subur lokasi Padang Tarok SP.1.
- i) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sijunjung melaksanakan penyuluhan KB dengan membawa mobil yang dilengkapi film untuk pemutaran film dilokasi Padang Tarok Sp.1. Padang Tarok SP.1 diupayakan nantinya menjadi Kampung KB sesuai dengan target yang diberikan oleh Pusat.
- j) Dengan adanya MOU antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jawa Tengah telah di tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- k) Untuk menunjang penempatan telah terealisasi HPL dan sampai akhir tahun 2017 belum ditandatangani oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan diharapkan pada tahun 2018 IPK sudah dapat terealisasi dan terjadi penempatan warga transmigrasi sejumlah 185 KK.

3. Membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017

Tabel 3.21
Target, Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2016			2017		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja %	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja %
Persentase tenaga kerja yang berkompeten	66,15	52,69	79,65	44,31	45,54	102,77
Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi	11,36	9,47	83,36	-	-	-
Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	-	-	-	49,37	49,37	100
Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	17,43	19,13	109,75	21,46	28,45	132,57
Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	87,20	105	120,41	3,54	6,19	174,85
Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial	4,87	4,49	92,20	-	-	-
Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	4,73	6,11	129,17
Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	6,86	6,79	98,98	-	-	-
Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	-	-	-	7,07	7,50	106,08
Persentase kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	48,82	48,77	99,90	-	-	-
Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan	-	-	-	48,82	48,57	99,28
Persentase perusahaan melakukan SMK3	10,64	8,74	82,14	10,64	10,65	100,09
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi	75	75	100	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya	75	75	100	-	-	-
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya	-	-	-	40,00	40,00	100

Analisis membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah.

Indikator yang dikaji adalah terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

➤ Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017

Hasil pengukuran Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

- Sasaran strategis 1 meningkatnya tenaga kerja yang kompeten terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
 - Persentase tenaga kerja yang berkompeten dengan target kinerja 44,31%, realisasi 45,54% dengan capaian kinerja menjadi 102,77%. capaian indikator kategori “sangat baik”.
 - Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan target kinerja 49,37%, realisasi 49,37% dengan capaian kinerja menjadi 100%. capaian indikator kategori “sangat baik”.
- Sasaran strategis 2 meningkatnya serapan tenaga kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :
 - Persentase serapan tenaga kerja sektor formal dengan target kinerja 21,46% realisasi 28,45% dan capaian kinerja 132,57%. capaian indikator kategori “sangat baik”.
 - Persentase serapan tenaga kerja sektor informal dengan target kinerja 3,54%, realisasi 6,19% dengan capaian kinerja 174,85%. capaian indikator kategori “sangat baik”.
- Sasaran strategis 3 (tiga) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :

- Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial dengan target 4,73%, realisasi 6,11% dan capaian kinerja sebesar 129,17%, capaian indikator kategori “sangat baik”.
- Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan target 7,07%, realisasi sebesar 7,50% dan capaian kinerja sebesar 106,08%. capaian indikator kategori “sangat baik”.
- Sasaran strategis 4 meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :
 - Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan target 48,92%, realisasi 48,57% dan capaian kinerja sebesar 99,28%. capaian indikator kategori “baik
 - Persentase perusahaan yang melakukan SMK3 dengan target 10,64%, realisasi 10,65% dan capaian kinerja sebesar 100,09%. capaian indikator kategori “Baik
- Sasaran strategis 5 terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi dengan indikator
 - Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya dengan target 40,00%, realisasi 40,00%. Dan capaian indikator kinerja sebesar 100%, capaian indikator kategori “baik

Tabel 3.22

Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra organisasi.

Indikator Kinerja	2017			2021
	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
Persentase tenaga kerja yang berkompeten	44,31	45,54	102,77	44,06
Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi	-	-	-	-
Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi	49,37	49,37	100	22,32
Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	21,46	28,45	132,57	21,71
Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal	3,54	6,19	174,85	8,30
Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial	4,73	6,11	129,17	3,12
Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	7,07	7,50	106,08	7,94

Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	7,07	7,07	7,07	
Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan	48,82	48,57	99,28	49,74
Persentase perusahaan melakukan SMK3	10,64	10,65	100,09	12,08
Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya	40,00	40,00	100	60,00

5. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap per sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja indikator pada umumnya kategori sangat baik dan baik dari masing-masing Indikator :

- a) Hal ini ditunjang oleh peningkatan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2017.
- b) Adanya koordinasi dan partisipasi aktif dari Dinas / Instansi terkait dan dunia usaha serta masyarakat luas
- c) Meningkatnya jejaring kerjasama dengan semua pihak terkait.
- d) Merubah pola kerja dan mine set Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Tugas Fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.
- e) Meningkatnya kesamaan persepsi antara pihak Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk pencapaian target.
- f) Penghargaan tertinggi yang diperoleh atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan produktifitas Paramakarya tahun 2017 yang diberikan oleh Presiden RI.
- g) Terbentuk kerjasama (MOU) dengan Provinsi Jawa Tengah terhadap penempatan warga transmigrasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di dukung oleh 235 personil yang terdiri dari 233 orang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang pegawai harian dengan rincian sebagai berikut:

)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas	=	233 orang
)	Pejabat Struktural	=	35 orang
-	Kepala Dinas	=	1 orang
-	Pejabat Eselon III	=	10 orang
-	Pejabat Eselon IV	=	24 orang
)	Pejabat Fungsional	=	53 orang
-	Pengawas Ketenagakerjaan	=	4 orang
-	Perantara Hubungan Industrial	=	4 orang
-	Pengantar Kerja	=	11 orang
-	Pengerak Swadaya Masyarakat	=	5 orang
-	Instruktur	=	27 orang
-	Teknisi Litkayasa	=	2 orang
)	Jabatan Fungsional Umum	=	147 orang
-	Dinas	=	91 orang
-	Pegawai Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	=	12 orang
-	Pegawai Balai Pengembangan dan Produktifitas Daerah	=	9 orang
-	Pegawai Balai Latihan Kerja Padang Panjang	=	10 orang
-	Pegawai Balai Latihan Kerja Payakumbuh	=	9 orang
-	Pegawai Balai Latihan Transmigrasi	=	14 orang
-	Pegawai Harian	=	2 orang

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

➤ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta terbentuknya wirausaha baru, dengan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu.

➤ Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja atau kesempatan kerja baik formal maupun informal dalam rangka pengurangan pengangguran. Adapun indikator program pesentase srapan tenaga kerja sektor formal.

- Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Program ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan meningkatkan peranan lembaga ketenagakerjaan guna mengurangi jumlah kasus perselisihan hubungan industrial serta meningkatkan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun indikator program ini adalah berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial.
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium guna meningkatkan kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Adapun indikator program ini adalah besaran pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan.
- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Adapun indikator program ini adalah persentase perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.
- Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
Program ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan transmigrasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Adapun indikator program ini adalah persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemeriksaan dan pengujian lingkungan terhadap perusahaan. Adapun indikator program ini adalah meningkatnya pemasukan keuangan daerah.

Realisasi Anggaran

- a) Dana APBD yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 berjumlah Rp.38.180.419.729,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :

- Realisasi fisik = 97,19 %
- Realisasi keuangan = 94,56 % (Rp.36.101.653.019,-)

Tabel 3.23

Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
	BELANJA PEGAWAI					
1	Gaji dan Tunjangan	15.759.485.927	14.944.380.937	94,83	94,83	815.104.990
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.887.949.385	4.637.190.449	94,87	94,87	250.758.936
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.755.000	13.755.000	100	100	0
	Jumlah	20.661.190.312	19.595.326.386	94,84	94,84	1.065.863.926

BELANJA LANGSUNG

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
I.	POKOK	5.105.375.459	4.775.508.521	93,54	100	329.866.938
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.568.027.380	2.396.756.983	93,33	100	171.270.397
1	Penyediaan jasa surat menyurat	98.715.380	82.589.700	83,66	100	16.125.680
2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	510.079.500	463.017.108	90,77	100	47.062.392
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor, pengaman dan sopir kantor	949.359.000	899.314.657	94,73	100	50.044.343
4	Penyediaan alat tulis kantor	102.717.750	102.034.550	99,33	100	683.200
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.930.750	62.975.600	94,09	100	3.955.150
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	23.381.750	23.362.575	99,92	100	19.175
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.928.000	24.035.000	89,26	100	2.893.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	76.271.250	72.233.000	94,71	100	4.038.250
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	563.240.375	534.192.711	94,84	100	29.047.664
10	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	131.403.625	115.352.082	87,78	100	24.361.600
11	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	19.000.000	17.650.000	92,89	100	7.450.000

B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.277.905.900	1.198.792.736	93,81	100	79.113.164
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	343.141.000	333.380.000	97,16	100	9.761.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.898.000	220.643.500	96,82	100	7.254.500
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	232.257.000	192.911.186	83,06	100	39.345.814
4	Pengadaan meubeleu	29.199.500	27.680.000	94,80	100	1.519.500
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	111.375.000	93.557.050	84,00	100	17.817.950
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	334.035.400	330.621.000	98,98	100	3.414.400
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	190.400.000	186.300.000	97,85	100	4.100.000
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	190.400.000	186.300.000	97,85	100	4.100.000
D.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48.625.000	39.560.000	81,36	100	9.065.000
1.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	48.625.000	39.560.000	81,36	100	9.065.000
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	644.512.929	617.319.175	97,78	100	27.193.754
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	249.995.000	247.926.625	99,17	100	2.068.375
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	394.517.929	369.392.550	93,63	100	25.125.379
F.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET	375.904.250	336.779.627	89,59	100	39.124.623
1.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	155.665.000	152.908.348	98,23	100	2.756.652
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	71.000.000	67.740.179	95,41	100	3.259.821
3.	Pengeolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	149.239.250	116.131.100	77,82	100	33.108.150

No	Program / Kegiatan	Dana (Rp.)	Realisasi		Fisik %	Sisa Dana (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	%		
II.	URUSAN	12.413.853.958	11.730.818.112	94,50	100	683.035.846
A.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.893.173.721	8.331.966.757	93,69	100	561.206.964
1.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Payakumbuh	3.550.880.993	3.346.683.448	94,25	100	204.197.545
2.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Padang Panjang	3.641.290.873	3.357.247.210	92,20	100	284.043.663
3.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)	238.774.000	234.795.050	98,33	100	3.978.950
4.	Seleksi calon peserta magang ke Jepang	325.000.000	308.976.770	95,07	100	16.023.230
5.	Akreditasi program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	124.564.000	115.116.450	92,42	100	9.447.550
6.	Pelatihan pemagangan dalam negeri	150.000.000	144.212.450	96,14	100	5.787.550
7.	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri	50.000.000	49.306.800	98,61	100	693.200
8.	Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktif	322.845.000	310.534.150	96,19	100	12.310.850
9.	Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	65.065.000	60.980.800	93,72	100	4.084.200
10.	Uji sertifikasi kompetensi metodologi pelatihan	357.755.855	341.883.429	95,56	100	15.872.426
11.	Pelatihan soft skill instruktur	66.998.000	62.230.200	92,88	100	4.767.800
B.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DISVERSIFIKASI USAHA	1.227.472.137	1.195.285.143	97,38	100	32.186.994
1.	Pengumpul dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK)	40.000.000	38.177.050	95,44	100	1.822.950
2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	50.000.000	44.258.100	88,52	100	5.741.900
3.	Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri / Luar Negeri	80.000.000	79.270.000	99,09	100	730.000
4.	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pogram Gramen Bank	17.210.600	17.210.600	100	100	0
5.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja	85.000.000	84.444.300	99,35	100	555.700
6.	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	200.000.000	198.066.000	99,03	100	1.934.000
7.	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)	237.937.537	234.441.550	98,53	100	3.495.987
8.	Sosialisasi peraturan di perusahaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan	70.000.000	68.194.650	97,42	100	1.805.350
9.	Identifikasi lokasi wilayah padat karya	44.324.000	42.937.400	96,87	100	1.386.600
10.	Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK	75.000.000	74.377.700	99,17	100	622.300

11.	Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja	48.000.000	40.198.000	83,75	100	7.802.000
12.	Pembinaan calon TKI Pra Pemberangkatan	100.000.000	97.995.958	98,00	100	2.004.042
13.	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS)	110.000.000	105.805.335	96,19	100	4.194.665
14.	Monitoring dan Orientasi Pra-Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD	70.000.000	69.908.500	99,87	100	91.500
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	434.556.500	411.471.250	94,69	100	623.085.250
1.	Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	96.936.500	95.362.000	98,38	100	1.574.500
2.	Pembinaan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan	96.973.000	89.428.450	92,22	100	7.544.550
3.	Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	82.691.000	82.619.550	99,91	100	71.450
4.	Pembinaan dan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi	100.400.000	93.676.000	93,30	100	6.724.000
5.	Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	57.556.000	50.385.250	87,54	100	7.170.750
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA	1.102.747.400	1.048.826.433	95,11	100	53.920.967
1.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ke Perusahaan Kabupaten/Kota	187.367.150	175.956.700	93,91	100	11.410.450
2.	Pembinaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Perusahaan	251.037.500	242.365.350	96,55	100	8.672.150
3.	Identifikasi Kecelakaan Kerja di Perusahaan Kab/Kota	137.336.500	132.251.250	96,50	100	5.085.250
4.	Pra-Akreditasi laboratorium	148.292.150	135.896.301	91,64	100	12.395.849
5.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	149.130.100	143.858.659	96,47	100	5.271.441
6.	Pengujian Lingkungan Kerja	149.784.000	144.061.950	96,14	100	5.722.050
7.	In House Training Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	79.800.000	74.436.223	93,28	100	5.363.777
E.	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL	604.302.200	591.666.529	97,91	100	12.635.671
1.	Pelatihan Keterampilan warga Transmigrasi	500.000.000	493.024.750	98,60	100	6.975.250
2.	Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi	104.302.200	98.641.779	94,57	100	5.660.421

F.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	151.602.000	151.602.000	100,00	100	0
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	151.602.000	151.602.000	100,00	100	0
	Jumlah Belanja Langsung	17.332.182.900	15.397.015.922	88,83	99,01	1.935.766.978

Dana APBN yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 berjumlah Rp. 7.299.447.000,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :

- Realisasi Fisik = 99,23 %
- Realisasi Keuangan = 96,26 % (Rp.7.026.110.633,-)

Tabel 3.342
Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2017

NO. KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Fisik (%)	DANA (Rp)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
I	SATUAN KERJA (026.04.089079) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (04)			
026.13.06	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	99,31	2.499.295.000	2.464.969.614
2218	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	100,00	101.610.000	101.308.826
4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	94,40	97.980.000	82.442.000
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	100,00	1.908.400.000	1.906.376.000
4060	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	97,00	391.305.000	374.842.788
II	SATUAN KERJA (026.05.089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT (05)			
026.05.08	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	100,00	788.970.000	768.629.950
2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan	100,00	197.470.000	193.144.750
2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,00	35.000.000	28.373.000
2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	100,00	183.476.000	182.408.700
2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100,00	170.024.000	166.237.000

III	SATUAN KERJA (026.06.089023) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (06)			
067.07.10	PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	100,00	1.366.200.000	1.340.974.574
5505	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	100,00	1.093.857.000	1.083.960.674
5507	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	100,00	222.131.000	207.951.900
5508	Penyediaan Tanah Transmigrasi	100,00	20.764.000	19.690.500
5510	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	100,00	29.448.000	29.371.500
IV	SATUAN KERJA (067.08.350145) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI			
067.08.11	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	98,89	858.844.000	817.162.500
5511	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	96,40	192.764.000	169.238.500
5512	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	100	42.051.000	38.174.000
5513	Pengembangan usaha transmigrasi	100	118.300.000	117.972.000
5514	Pengembangan sosial budaya transmigrasi	100	445.229.000	434.202.000
5515	Pelayanan pertanahan transmigrasi	100	60.500.000	57.576.000
V	SATUAN KERJA (026.08.089025) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (08)			
026.08.09	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	98,36	1.786.138.000	1.634.373.995
2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	93,33	438.998.000	377.508.934
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	100,00	38.620.000	35.200.000
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100,00	712.538.000	652.644.218
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100,00	356.530.000	342.396.543
2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	100,00	239.452.000	226.624.300
	JUMLAH RUPIAH MURNI	99,23	7.299.447.000	7.026.110.633

BAB. IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun berdasarkan Laporan Kinerja yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Sasaran Srategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten.
- Meningkatnya serapan tenaga kerja.
- Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
- Terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Capaian kinerja untuk tahun anggaran 2017.

- Indikator 1 : Persentase tenaga kerja yang berkompeten, capaian kinerja 102,77%, predikat “Sangat Baik”
- Indikator 2 : Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), capaian kinerja 100%, predikat “Sangat Baik”
- Indikator 3 : Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 4 : Persentase serapan tenaga kerja sektor informal, capaian kinerja 174,857%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 5 : Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial, capaian kinerja 129,17%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 6 : Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja 106,08%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 7 : Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian kinerja 99,28%,predikat “Baik”
- Indikator 8 : Persentase perusahaan yang melakukan SMK3, capaian kinerja 100,09%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 9 : Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,predikat “Sangat Baik”
- Indikator 10 : Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya, capaian kinerja 100%,predikat “Sangat Baik”

2. Saran

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk

- Perbaiki perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- Meningkatkan Koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19700114 198902 1 001

PENGUKURAN KINERJA

